



# Strategi Kerjasama Pembangunan Australia Indonesia 2008–13



© Hak cipta Pemerintah Australia 2008

Dokumen ini memiliki hak cipta. Selain yang telah menjadi ketentuan penggunaan dibawah Hukum Hak Cipta 1968, dilarang untuk mencetak ulang bagian mana pun dari dokumen ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemerintah Australia. Permintaan dan pertanyaan seputar pencetakan ulang dan hak cipta bisa ditujukan kepada Commonwealth Copyright Administration, Attorney General's Department, Robert Garran Offices, National Circuit, Barton ACT 2600 atau melalui <http://www.ag.gov.au/cca>

ISBN 978 1 921285 30 1

Diterbitkan oleh *Australian Agency for International Development* (AusAID), Canberra, Juni 2008

Dokumen ini tersedia di [www.aid.gov.au/publications](http://www.aid.gov.au/publications)

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program bantuan luar negeri Pemerintah Australia, hubungi:

Public Affairs Group

AusAID

GPO Box 887

Canberra ACT 2601

Telp +61 (02) 6206 4000

Facsimile +61 (02) 6206 4695

Internet [www.aid.gov.au](http://www.aid.gov.au)

Dirancang oleh GRI.D, Canberra

Diedit oleh Clarity Communications Australia Pty Ltd

Dicetak oleh New Millennium Print, Canberra

FOTO SAMPUL DEPAN: *Murid sekolah merayakan peresmian sekolahnya di Kupang, NTT. Sekolah Satu Atap (SATAP) Nunkurus merupakan salah satu dari 2000 sekolah yang dibangun atau diperluas dengan dana dari Australia, yang turut mendukung program wajib belajar sembilan tahun Pemerintah Indonesia.* FOTO: Karen Ingram, AusAID

FOTO KECIL BAGIAN

ATAS: *Akses air bersih dan sanitasi yang lebih baik turut memperbaiki kualitas hidup, kesehatan dan produktivitas pedesaan miskin termasuk di Sumatera Selatan.*

FOTO: Rani Noerhadhie

TENGAH: *Karyawan dari Yayasan GAIA, sebuah LSM yang didanai oleh Australia, memberikan pelatihan kerja kepada para tukang dan masyarakat setempat untuk membangun bangunan tahan gempa di Yogyakarta.*

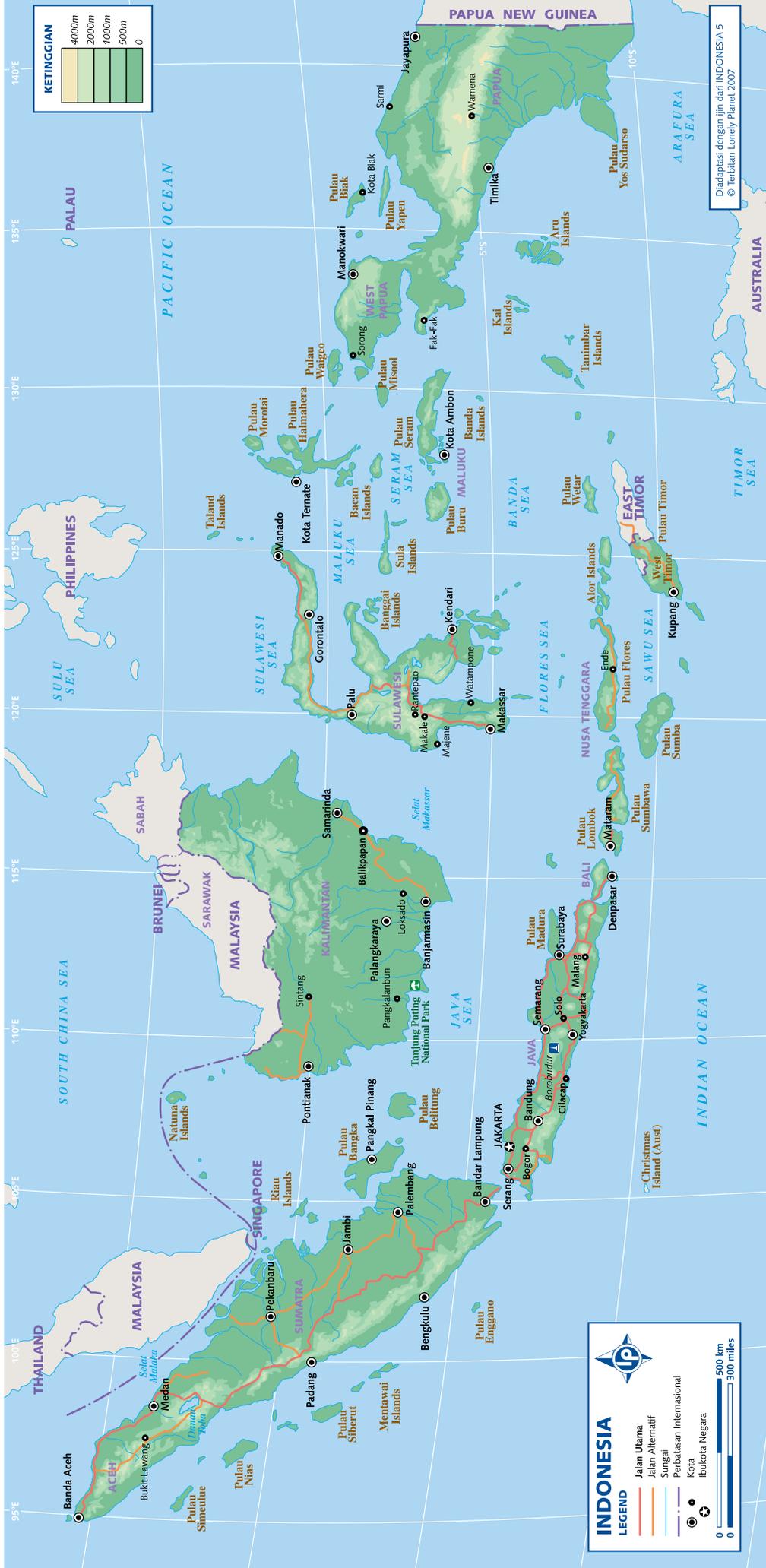
FOTO: Dian Lestari

BAWAH: *Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang proses pemilu dan mendukung partisipasi mereka, menguatkan demokrasi di Indonesia.*

FOTO: Irene Insandjaja, AusAID

# Isi

<b>PENGANTAR</b>	<b>1</b>
<b>KONTEKS EKONOMI DAN SOSIAL POLITIK</b>	<b>2</b>
<b>KONTEKS PEMBANGUNAN</b>	<b>5</b>
<b>FOKUS GEOGRAFIS KEMITRAAN AUSTRALIA INDONESIA</b>	<b>6</b>
<b>KERANGKA KERJA STRATEGIS</b>	<b>8</b>
Pilar 1: Pertumbuhan yang berkelanjutan dan manajemen ekonomi	8
Pilar 2: Investasi untuk pembangunan manusia	11
Pilar 3: Demokrasi, keadilan dan pemerintahan yang baik	14
Pilar 4: Keamanan dan kedamaian	16
<b>PELAKSANAAN STRATEGI</b>	<b>18</b>
Kemitraan	18
Kesetaraan jender	21
Memberantas korupsi	22
Kinerja	23
<b>LAMPIRAN 1: RINGKASAN KERANGKA KERJA STRATEGIS</b>	<b>24</b>
<b>LAMPIRAN 2: KERANGKA KERJA PENILAIAN KINERJA</b>	<b>26</b>



# Pengantar

Australia dan Indonesia memiliki hubungan bilateral yang erat, terutama melalui kerjasama pembangunan. Karena letak geografis yang berdekatan dan keinginan yang sama untuk mewujudkan kawasan yang damai, stabil dan makmur, kedua negara telah bekerja sama untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut dan meningkatkan kerjasama dalam bidang yang terkait dengan masalah lingkungan hidup (termasuk bencana alam), dan ancaman-ancaman kejahatan serta kesehatan lintas negara. Hubungan erat antara kedua negara menjadi dasar bagi pengembangan Strategi Kerjasama Pembangunan Australia Indonesia 2008–13. Strategi ini memaparkan rencana di masa depan dengan memadukan berbagai kemajuan yang dicapai dan pelajaran-pelajaran berharga yang dapat dijadikan acuan.

Strategi Kerjasama ini, yang merupakan rencana menyeluruh dukungan Australia untuk Indonesia ini adalah tindak lanjut dari bantuan \$1 miliar kepada Indonesia melalui program *Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development* (AIPRD), menunjukkan komitmen jangka panjang Australia bagi pembangunan Indonesia. Dana AIPRD tidak hanya digunakan untuk rekonstruksi dan pembangunan Aceh pasca-tsunami, tetapi juga digunakan untuk berbagai program pembangunan berskala besar di daerah-daerah lain di Indonesia. Sebagaimana telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia, akan ada sebuah kerangka khusus yang menjadi acuan semua program Kemitraan Australia Indonesia (AIP).

Tujuan AIP adalah memastikan Strategi Kerjasama ini dapat membantu mencapai pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan dengan pencapaian target-target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)<sup>1</sup> Indonesia. RPJM tersebut sejalan dengan agenda pembangunan internasional yang telah disetujui. Maka, hasil dari strategi ini akan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam *Millennium Development Goals* (MDG) dan komitmen para donor dan negara berkembang yang tertuang dalam *Paris Declaration on Aid Effectiveness*<sup>2</sup>. Aspek penting dalam Deklarasi Paris ini adalah komitmen untuk bekerja melalui sistem pemerintah negara mitra guna memastikan negara tersebut mempunyai rasa memiliki dan agar gagasan-gagasan tersebut bisa berjalan berkelanjutan.

AIP memahami bahwa Indonesia masih dalam proses transisi menuju demokrasi yang tertumpu pada pemerintahan daerahnya, dan menghadapi tantangan-tantangan pembangunan politik, ekonomi dan sosial. Meskipun demikian, kemajuan ekonomi Indonesia menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat pendapatan menengah. Strategi ini disusun berdasarkan kondisi-kondisi tersebut.

1 Rencana Jangka Menengah terkini memuat periode 2004-09. Setelah dikeluarkannya RPJM 2010-14, pengkajian jangka menengah Strategi Kerjasama Pembangunan akan dilaksanakan.

2 Deklarasi Paris ini dibentuk tahun 2005.

## 2 Konteks ekonomi dan sosial-politik

**Indikator makro ekonomi.** Strategi ini dirancang dengan asumsi pertumbuhan ekonomi menengah yang berkisar antara 5,5 hingga 6,5 persen (tingkat pertumbuhan pada tahun 2007 adalah 6,3 persen), walaupun tetap bersifat fleksibel untuk penyesuaian ke tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi atau lebih rendah. Tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi kemungkinan sulit dicapai dalam jangka pendek karena terbatasnya persediaan, kurang fleksibelnya struktur pemerintahan serta kelemahan-kelemahan lain dalam pemerintahan yang menghalangi masuknya investasi dan penciptaan peluang kerja. Meskipun tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Indonesia akan mengalami krisis yang serupa dengan yang dialami pada akhir 1990-an, Indonesia tetap rawan terhadap krisis yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa internasional.

**Kemiskinan dan wilayah-wilayah tertinggal.** Menurunkan angka kemiskinan tetap menjadi tantangan yang besar di Indonesia dimana 49 persen dari penduduknya (sekitar 110 juta orang) masih hidup dengan pendapatan US\$2 atau kurang sehari. Sekitar 17 persen dari jumlah penduduk tersebut hidup di bawah garis kemiskinan (menurut data Pemerintah Indonesia tahun 2007). Kesenjangan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia masih terjadi di seluruh kepulauan Indonesia, antara provinsi satu dengan yang lain, antara daerah satu dengan daerah lain dalam satu provinsi, dan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di beberapa kota tertentu di Jawa dan Bali, misalnya, tingkat kemiskinan berada di bawah lima persen, sedangkan tingkat kemiskinan di beberapa kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat hampir mencapai 40 persen. Selanjutnya, di beberapa kotamadya terkaya, kemiskinan dapat dikurangi hingga setengahnya pada periode 1999–2006, sementara di



*Kemitraan Australia Indonesia menargetkan daerah-daerah miskin di Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Timur, guna mencapai target MDGs. Prioritasnya adalah memastikan akses untuk mendapatkan air bersih dan sanitasi. FOTO: Donang Wahyu*

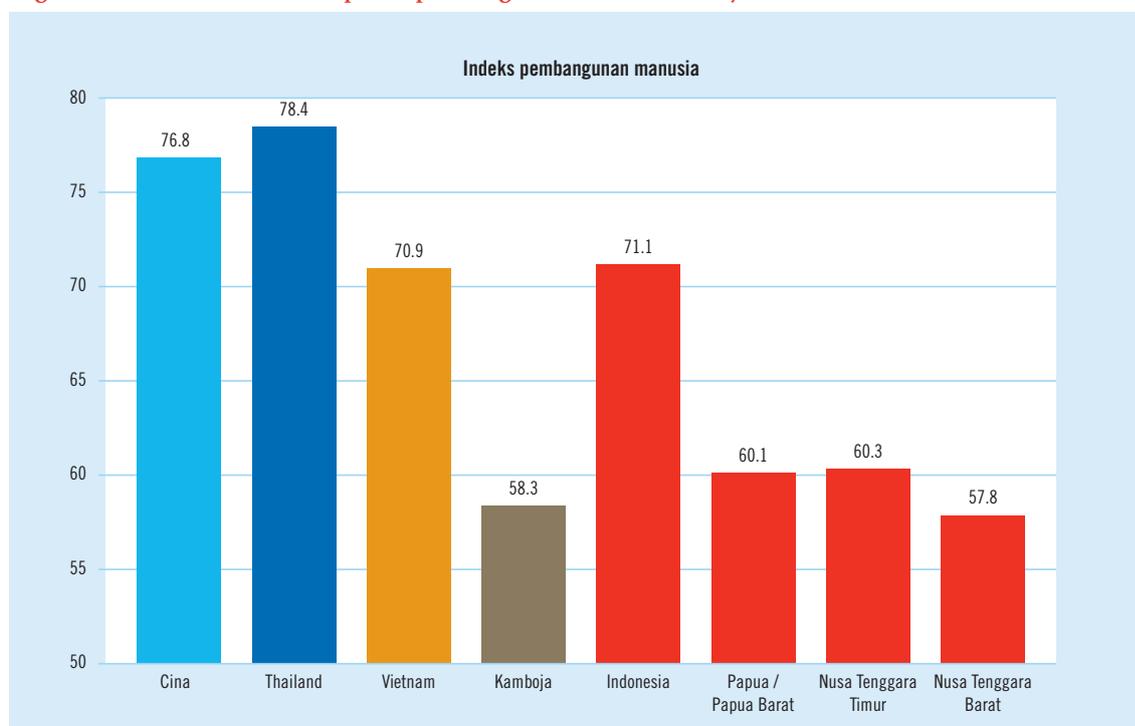
kabupaten-kabupaten termiskin, tingkat kemiskinan hanya turun 1/6-nya saja. Bagan 1 membandingkan data pembangunan manusia di kawasan Asia dan di wilayah-wilayah di Indonesia. Meskipun Indonesia kini termasuk negara berkembang dengan pendapatan menengah, banyak dari provinsi dan kabupatennya yang memiliki tingkat pendapatan sebanding dengan negara-negara berkembang berpendapatan rendah.

**Millennium Development Goals<sup>3</sup>.** Data tahun 2007 memperlihatkan bahwa Indonesia akan mampu mencapai target-target MDG dalam hal pengentasan kemiskinan, jumlah siswa pendidikan dasar, tingkat kemampuan membaca, penghapusan kesenjangan gender, penghentian penyeberluasan penyakit tuberkolosis dan peningkatan kualitas sanitasi. Indonesia juga tengah menurunkan jumlah penduduk yang terjangkit malaria, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan air bersih, mengurangi tingkat kematian anak dan meningkatkan jumlah siswa yang mampu menuntaskan pendidikan dasar. Dengan usaha yang berkelanjutan, Indonesia akan mampu mencapai target-target tersebut.

Untuk mempercepat pencapaian target MDGs, Indonesia berencana menyertakan MDGs ke dalam rencana anggaran pembangunan tingkat provinsi dan lokal, dan memperkuat kemampuan pengawasannya. Meskipun demikian, tanpa adanya upaya yang kuat, nampaknya Indonesia tidak akan memenuhi target penurunan angka kematian ibu, peningkatan gizi anak, penurunan angka penderita HIV atau pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu, data terkait masalah pembangunan manusia yang dikeluarkan negara tidak menggambarkan kesenjangan yang terjadi di tingkat daerah, dan meskipun ada banyak target MDG yang dapat dicapai pada tingkat nasional secara keseluruhan di tahun 2015, tantangan terbesar yang dihadapi adalah mengusahakan agar pencapaian tersebut terjadi secara merata di seluruh daerah di Indonesia.

**Desentralisasi dan dampaknya bagi pelayanan publik.** Desentralisasi yang dilakukan di Indonesia pada tahun 2001 dan 2004, termasuk ketentuan Otonomi Khusus, telah merubah peta politik, administrasi dan ekonomi Indonesia. Selain bidang-bidang khusus seperti pertahanan dan urusan luar negeri, sebagian besar kekuatan dan tanggung jawab politis untuk memberikan pelayanan kini

**Bagan 1: Indikator-indikator komparatif pembangunan manusia di wilayah Asia dan di Indonesia**



Sumber: Indikator-indikator Pembangunan Bank Dunia tahun 2006, Laporan Pembangunan Manusia BAPPENAS-UNDP Indonesia tahun 2004 dan berbagai laporan pembangunan manusia UNDP lainnya.

3 Pada *Millennium Summit* tahun 2000, Negara-negara anggota PBB serempak mengeluarkan Deklarasi Milenium yang terdiri dari delapan *Millennium Development Goals* (MDGs), yang difokuskan pada usaha-usaha pembangunan untuk mengatasi tantangan-tantangan utama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang hingga tahun 2015. MDGs tersebut terdiri dari: (1) Mengentaskan kemiskinan dan kelaparan ekstrim, (2) Mencapai pendidikan dasar secara umum, (3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, (4) Mengurangi tingkat kematian anak, (5) Meningkatkan kesehatan ibu, (6) Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya, (7) Memastikan pembanguna yang berkelanjutan, (8) Membangun kemitraan global untuk pembangunan.

tertumpu pada tingkat pemerintahan provinsi dan kabupaten (terutama kabupaten). Namun, peningkatan wewenang ini tidak sebanding dengan peningkatan kemampuan sumber manusia, kemampuan pengelolaan keuangan, akuntabilitas dan infrastruktur yang diperlukan bagi terwujudnya pemberian pelayanan masyarakat yang efektif. Pemerintah Indonesia telah bertekad untuk melakukan reformasi dan telah mengambil langkah-langkah nyata dengan menetapkan sejumlah kebijakan, tetapi pelaksanaan yang baik di seluruh lapisan tetap diperlukan untuk memastikan bahwa kemajuan ekonomi yang telah dicapai akan menguntungkan semua pihak.

**Pemerintahan dan korupsi.** Pemerintahan yang buruk – baik disebabkan oleh kurangnya akuntabilitas antara pemerintah, masyarakat sipil dan umum, maupun oleh tindakan korupsi – tetap menjadi hambatan utama bagi pembangunan. Indonesia telah memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi. Meskipun terdapat kemajuan dalam pembentukan kelembagaan negara dan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK), masih ada banyak hambatan yang harus diatasi.

**Kesetaraan jender.** Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong peningkatan kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan. Namun, kemajuan yang dicapai belum begitu nyata dan tantangan-tantangan berat masih harus dihadapi. Misalnya, tingkat ketidaksetaraan jender dalam kemudahan memperoleh fasilitas kesehatan di daerah pedesaan masih tinggi, dan Indonesia memiliki angka kematian ibu tertinggi di kawasan Asia dengan 307 kematian per 100.000 kelahiran (di Papua angka kematian tersebut lebih dari 1000). Perempuan juga tidak cukup terwakili dalam posisi-posisi kepemimpinan yang melalui proses pemilihan langsung dan dalam posisi manajemen pelayanan publik. Selain itu, kesempatan untuk mendapatkan peluang ekonomi dan mendapatkan kredit serta sumber daya lain yang diperlukan untuk melakukan kegiatan ekonomi juga masih kurang, dan ini menyebabkan kesenjangan yang sangat lebar. Tantangan yang harus dihadapi adalah menemukan cara-cara yang praktis dan efektif untuk mengurangi ketidaksetaraan dan memastikan perempuan dan laki-laki mendapatkan manfaat yang sama dari pembangunan.

4 Disampaikan pada Pidato Negara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bulan Januari 2007 dan ditunjukkan oleh Rencana Aksi Nasional untuk Pemberantasan Korupsi 2004-09.

### 3 Konteks pembangunan

**Sifat hubungan bilateral yang berubah.** Status regional dan ekonomi Indonesia yang berkembang telah mengubah sifat kerjasama pembangunan antara Australia dan Indonesia. Kemampuan Australia untuk membantu Indonesia melaksanakan kebijakan-kebijakan dan program-program utamanya dan membentuk jaringan antar pemerintah dan kemitraan praktis lainnya menjadi jauh lebih penting. Proyek-proyek tradisional yang berdiri sendiri menjadi kurang sesuai lagi dengan AIP.

AIRPD kini melakukan perubahan dengan mendukung program-program utama yang telah diidentifikasi oleh Indonesia sebagai program yang secara langsung membantu mencapai tujuan-tujuan dan target-target negara. Misalnya, komitmen kuat Pemerintah Australia terhadap Program Pendidikan Dasar senilai \$355 juta dirancang untuk mendukung Indonesia mencapai target wajib belajar sembilan tahun pendidikan dasar di tahun 2009. Strategi ini dibangun berdasarkan pendekatan tersebut.

**Peningkatan pemanfaatan sistem-sistem pemerintahan dan keterpaduan dengan donor lainnya.** Hasil penelitian yang dilakukan di Australia dan di tingkat internasional mengenai efektivitas pembangunan ternyata meragukan cara lama penyaluran bantuan *Official Development Assistance* (ODA) yang selama ini telah berlaku secara internasional. Indonesia, sebagai salah satu pihak yang menandatangani Deklarasi Paris, mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk mewujudkan akuntabilitas penuh dan kini mengelola pinjaman dan hibah dengan cara yang sesuai dengan deklarasi tersebut. Kini ada keinginan untuk lebih memanfaatkan sistem-sistem yang berlaku di Indonesia beserta prosesnya, dan bagi lembaga-lembaga donor untuk melakukan lebih banyak harmonisasi dan koordinasi dalam melakukan kegiatan mereka. Indonesia saat ini sedang membentuk mekanisme baru dalam mengkoordinasi para donor dengan melibatkan berbagai kelompok kerja per sektor dan Australia akan ikut berpartisipasi aktif. Pendekatan ini sejalan dengan pengkajian internal Australia atas Strategi

Kerjasama Pembangunan Australia Indonesia 2003–06, yang menyimpulkan lebih banyak peluang menyalurkan ODA melalui pendekatan multi donor.

AIP memahami bahwa bantuan pembangunan akan berdampak besar dan mempunyai cakupan program yang lebih luas bila disalurkan dengan cara memanfaatkan dan memperkuat sistem-sistem negara mitra. Dengan cara ini, Indonesia dapat memanfaatkan sumber dayanya sendiri dan meningkatkan pemberian pelayanannya, terutama pada tingkat pemerintahan daerah. Strategi ini menekankan peningkatan penggunaan sistem pemerintah dan pendekatan-pendekatan yang terkoordinasi guna mengoptimalkan efektivitas bantuan. Akan tetapi, Strategi ini meyakini akan adanya perubahan yang sangat besar dan perlunya pendekatan kasus per kasus guna memperkecil risiko dan mengidentifikasi serta mengatasi hambatan yang ada.

**Status pendapatan menengah dan celah untuk gagasan-gagasan bantuan AIP.** Status Indonesia sebagai negara dengan pendapatan menengah (pendapatan per kapita lebih dari US\$ 910 per tahun) mengakibatkan Indonesia tidak lagi memiliki akses untuk mendapatkan pinjaman berbunga rendah dari berbagai bank pembangunan multilateral dan harus meminjam dengan bunga yang tinggi. Pada saat yang bersamaan, pinjaman-pinjaman proyek kecil semakin banyak digantikan oleh program sektoral yang lebih besar dan bantuan pinjaman yang bertujuan mendukung anggaran. Kondisi ini berpotensi menghambat dukungan pelaksanaan proyek-proyek di tingkat masyarakat, yang kerap kali dibutuhkan sebagai dasar pelaksanaan gagasan-gagasan program yang lebih besar dan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas kegiatan pemberian bantuan. Indonesia enggan meminjam dengan bunga tinggi untuk mendanai proyek-proyek semacam itu dan lebih mengharapkan hibah. Maka, kondisi ini bisa menjadi celah bagi AIP untuk berperan menyalurkan dana hibah untuk membantu kegiatan di tingkat masyarakat.

## 4 Fokus geografis Kemitraan Australia Indonesia

Gagasan-gagasan AIP akan dijalankan pada tingkat pemerintah pusat maupun daerah (tingkat provinsi dan kabupaten). Australia harus berperan di tingkat pemerintah pusat untuk secara efektif menanggapi permintaan Indonesia akan bantuan yang terkait dengan kebijakan nasional dan alokasi sumber daya. AIP akan melakukan pendekatan strategis dan bekerja untuk pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan dengan membantu departemen-departemen yang berperan penting dalam menetapkan kebijakan dan sistem nasional (seperti Departemen Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional – BAPPENAS), serta departemen-departemen penting terkait fokus-fokus sektoral yang termuat dalam strategi ini (seperti kesehatan, pendidikan dan kehutanan). Dalam era desentralisasi ini, tanggung jawab perencanaan, penyusunan anggaran dan pemberian pelayanan lebih banyak berada di pemerintah tingkat kabupaten. Kegiatan-kegiatan di tingkat pusat akan menjadi acuan bagi kegiatan pada tingkat provinsi dan kabupaten, dan dukungan praktis pada tingkat ini akan berpengaruh positif pada tingkat pusat.

Secara geografis, Strategi Kerjasama ini memberikan prioritas kepada lima provinsi dengan indikator pembangunan yang rendah dan merupakan yang termiskin di Indonesia, yaitu Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Di provinsi-provinsi dimaksud, AIP akan mengoptimalkan keterkaitan antar sektor yang didukung oleh manajemen terpusat dan program pengaturan sumber daya. Sadar akan banyaknya tantangan pembangunan di Indonesia serta demi kepentingan bersama, Australia juga akan memberikan bantuan bagi daerah-daerah kritis di sejumlah provinsi lainnya, termasuk mendukung pendidikan Islam di Jawa, menurunkan tingkat

### PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Kemitraan Australia Indonesia tetap memberikan komitmennya pada pemulihan Aceh pasca tsunami dan pada stabilitas jangka panjang. Bantuan Australia untuk pasca-tsunami di Aceh telah sukses membangun kembali prasarana publik, membantu menghidupkan kembali mata pencaharian, dan meningkatkan kemampuan pemerintah lokal dalam memberikan pelayanan publik. Kemitraan ini akan terus melanjutkan upaya-upaya tersebut namun fokus utamanya akan beralih pada usaha mendukung perdamaian dan pembangunan jangka panjang di Aceh. Usaha ini akan dilakukan dengan mengintegrasikan beragam kegiatan sektoral yang menekankan pentingnya pemeliharaan perdamaian dan pemerintahan yang efektif bagi pembangunan di Aceh.

Kemitraan Australia Indonesia juga memahami kondisi Aceh yang masih lemah akibat konflik berkepanjangan. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan yang sesuai dengan konteks Aceh dan mendukung stabilitas provinsi tersebut. Melalui AIP, Australia akan bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam upaya mempertahankan dan memelihara kedamaian, stabilitas dan kesejahteraan di Aceh. Australia akan mengambil peran utama dalam membentuk forum donor dan pemerintah untuk perdamaian dan pembangunan guna memulihkan mata pencaharian, merangsang pertumbuhan ekonomi lokal dan membantu pemerintah setempat memberikan pelayanan publik yang efektif.

Melalui gagasan-gagasan program sektoral, AIP bertujuan untuk terus membangun dari keberhasilan-keberhasilan yang lalu dan memfasilitasi pelayanan publik yang lebih responsif dan transparan, memfasilitasi keinginan masyarakat akan pemerintahan yang lebih baik, membangun Aceh yang damai dan menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat Aceh.

penggundulan hutan di Kalimantan Tengah dan pertumbuhan daerah perkotaan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Menanggapi permintaan dari para perwakilan senior Pemerintah Indonesia, bantuan Australia akan meningkat di provinsi Papua dan Papua Barat, dan AIP akan bekerja sama secara erat dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait. Bantuan tersebut akan ditujukan untuk manajemen administrasi publik di pemerintah tingkat provinsi dan beberapa kabupaten terpilih, dalam hal pelayanan masyarakat dan menciptakan peluang ekonomi untuk menunjang mata pencaharian masyarakat. Mengingat HIV merupakan salah satu masalah

terbesar di Papua, kegiatan juga akan terfokus pada pencegahan dan penyebaran HIV dan perawatan bagi para pengidapnya. Di provinsi NTT dan NTB, gagasan-gagasan program akan dibangun berdasarkan kemitraan yang kokoh guna meningkatkan kemampuan administrasi umum dalam hal menyusun perencanaan yang baik dan memberikan pelayanan-pelayanan dasar, serta menumbuhkan berbagai peluang ekonomi. Untuk Di Aceh, strategi ini tidak lagi terfokus pada bantuan pasca-tsunami dan beralih kepada program pasca konflik yang berfokus pada peningkatan proses-proses kegiatan pemerintahan tingkat lokal, pelayanan-pelayanan dasar dan partisipasi masyarakat.



*Australia akan bekerjasama dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat di Kalimantan untuk mencoba beberapa pendekatan guna mengurangi penggundulan hutan dan dampak rumah kaca. FOTO: Ruandha Agung Sugardiman*

## 5 Kerangka strategis

Strategi AIP bertujuan untuk mendukung secara strategis pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan di Indonesia. Sasarannya adalah agar Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dapat **bermitra dalam upaya mencapai Indonesia yang lebih sejahtera, demokratis dan aman**, dengan melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia. Pilar-pilar utama Strategi ini adalah:

- Pilar 1** Pertumbuhan yang berkelanjutan dan manajemen ekonomi
- Pilar 2** Investasi untuk pembangunan manusia
- Pilar 3** Demokrasi, keadilan dan pemerintahan yang baik
- Pilar 4** Keamanan dan kedamaian.

Rangkuman kerangka kerja strategis tersedia dalam Lampiran 1.

### PILAR 1: PERTUMBUHAN YANG BERKELANJUTAN DAN MANAJEMEN EKONOMI

Australia akan bekerjasama dengan Indonesia untuk menghasilkan:

- > manajemen sumber daya alam dan tanggap terhadap perubahan iklim yang lebih baik
- > kebijakan ekonomi yang lebih baik dan manajemen ekonomi yang lebih kokoh di tingkat pusat
- > mengurangi hambatan-hambatan dalam pengembangan prasarana dan produktivitas.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia telah meningkat secara perlahan, menuju tingkat yang pernah dicapai pada masa sebelum krisis (tujuh

persen per tahun) dan tingkat kemiskinan juga menurun. Namun, tingkat pertumbuhan tersebut belum mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup atau mengurangi angka kemiskinan sesuai dengan target-target nasional. Di peringkat internasional, Indonesia berada di peringkat yang rendah di beberapa hal seperti di tingkat daya saing pemerintah, tingkat efisiensi bisnis dan tingkat investasi untuk infrastruktur fisik. Agar pertumbuhan ini terus berlanjut, Indonesia juga harus memperhatikan tantangan-tantangan di bidang lingkungan, seperti menyiapkan gagasan yang berkelanjutan dalam menghadapi perubahan iklim, kebutuhan energi, manajemen sumber daya alam dan kemudahan untuk mendapatkan air bersih.

Pilar 1 adalah dasar dari AIP. Pilar ini sangat menekankan pentingnya membantu Indonesia mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan melalui manajemen sumber daya dan ekonomi yang lebih baik. Bila memungkinkan, program-program ini akan dilengkapi dengan kerjasama ilmiah dan teknis antara badan-badan Australia dan Indonesia yang terkait. Usaha ini akan melibatkan program-program di berbagai bidang, seperti perubahan iklim dan lingkungan (termasuk kesehatan hewan dan kesuburan tumbuhan serta biosafety); infrastruktur; produktivitas daerah pedesaan; dan manajemen ekonomi. Australia juga akan mendukung organisasi-organisasi regional yang kuat (seperti ASEAN – Association of Southeast Asian Nations dan APEC – forum Asia Pacific Economic Cooperation) dan membantu Indonesia agar lebih berperan, sehingga mampu memetik manfaat ekonomi dari kolaborasi regional.

**Masalah perubahan iklim dan lingkungan** akan mendapatkan dukungan lebih dari Pemerintah



Memperbaiki produktivitas dan akses ke pasar bagi bisnis pertanian seperti produsen kacang mede di Sulawesi Tenggara yang menciptakan pertumbuhan ekonomi dan peluang kerja serta mengurangi kemiskinan. FOTO: Imran Lapong

Australia dari sisi pendanaan, manajemen dan kebijakan. AIP akan bekerja di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten untuk memperkuat Indonesia dalam hal tata kelola lingkungan, manajemen sumber daya nasional dan responnya terhadap perubahan iklim. Australia terutama akan membantu Indonesia mengurangi efek rumah kaca yang diakibatkan oleh penebangan hutan liar dan mendukung manajemen hutan yang berkelanjutan melalui gagasan penyelamatan hutan dan iklim. Australia juga akan menyertakan prinsip-prinsip perubahan iklim dalam setiap program terkait. Beberapa kegiatan sedang dipertimbangkan, dirancang dan dinegosiasikan dengan Indonesia dan beberapa mitra lain.

Dukungan **infrastruktur**, fokus utama lain dari AIP, akan sangat berperan terhadap pertumbuhan ekonomi. Australia tengah mengambil bagian dalam pinjaman yang diberikan oleh Bank Dunia sebesar \$300 juta untuk Proyek Peningkatan Jalan Nasional Indonesia Timur (EINRIP). Pinjaman tersebut digunakan untuk merehabilitasi sekitar 1,000 kilometer jaringan jalan nasional dan mengganti sekitar 4,5 km jembatan baja. Selain itu, sebuah program fasilitas baru pembangunan infrastruktur akan dimulai pada tahun 2008 guna mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia yang lebih luas baik pada tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, termasuk meningkatkan tata kelola di bidang infrastruktur. Program fasilitas tersebut akan menyeleksi pilihan-pilihan pendanaan inovatif yang akan membantu Indonesia memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Setelah pinjaman EINRIP diberikan secara menyeluruh, Australia akan memberikan hibah untuk melengkapi dana infrastruktur Pemerintah Indonesia, terutama untuk pembiayaan dan kualitas rancangan dan konstruksi. Prioritas AIP adalah membantu Pemerintah

Indonesia membiayai rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur di provinsi-provinsi prioritas.

**Air bersih dan sanitasi** telah menjadi perhatian utama bantuan pembangunan Australia kepada Indonesia sejak tahun 1970. Australia telah memberikan bantuan yang meskipun sedikit namun memberikan dampak yang signifikan terkait buruknya infrastruktur air dan sanitasi di Indonesia serta rendahnya investasi di bidang ini. Australia akan terus memberikan kontribusinya melalui dukungan langsung dan kontribusi pembiayaan, sambil menekankan pentingnya peran kebijakan yang baik dan tata kelola yang efektif dalam menyediakan pelayanan air bersih dan sanitasi. Australia akan membantu Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan dan mendanai usaha penyediaan air bersih dan sanitasi pada tingkat provinsi dan kabupaten. Australia juga akan terus bekerja sama dengan lembaga donor lainnya, terutama Bank Dunia.

Indonesia memiliki banyak industri berskala kecil dengan tingkat keberagaman yang tinggi. AIP akan terus bekerja sama dengan lembaga-lembaga donor lainnya, terutama dengan *International Finance Corporation (IFC)*, untuk memperbaiki manajemen dan transparansi lembaga-lembaga keuangan mikro dan mengusahakan terbentuknya lingkungan yang baik bagi pertumbuhan usaha. Salah satu fokusnya adalah memudahkan masyarakat pedesaan untuk mendapatkan sumber keuangan, terutama di provinsi-provinsi prioritas.

Meningkatkan **pertumbuhan pedesaan** sangat penting bagi terciptanya pembangunan yang adil dan merata di seluruh Indonesia. AIP bertujuan untuk memberikan sumbangan bagi pertumbuhan pedesaan dan peningkatan pendapatan rumah tangga yang bisa memberikan dampak yang nyata. Saat ini



Di wilayah timur Indonesia, hingga 1000 km jalanan dan jembatan umum akan diperbaiki guna mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. FOTO: Dewi Niaga

hal ini dilakukan dengan meningkatkan produktivitas petani, mendukung terciptanya akses pasar yang lebih baik dan mudah secara adil dan merata, dan mewujudkan kegiatan-kegiatan bernilai lebih di bidang pertanian maupun bidang lainnya. Australia juga bekerja sama dengan IFC dan para donor untuk daerah pedesaan guna menciptakan lingkungan yang memungkinkan tumbuhnya peluang bisnis, akses keuangan yang merata, keterlibatan sektor swasta yang berkelanjutan dalam bidang infrastruktur, dengan fokus provinsi-provinsi yang menjadi prioritas dan Sulawesi. Bantuan Australia bertujuan untuk mendorong sektor **usaha kecil dan menengah** yang lebih kompetitif, aktif dan berkembang guna memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan dalam usaha menumbuhkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan bagi laki-laki dan perempuan.

Dukungan AIP bagi kegiatan usaha kecil dan menengah yang efektif bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja yang baik di daerah pedesaan dan perkotaan. Untuk melengkapi ini, AIP akan mendukung reformasi perlindungan sosial dan kebijakan terkait pasar tenaga kerja. AIP berniat menciptakan pekerjaan yang baik dan produktif, yang akan meningkatkan kondisi pekerja dan memastikan terwujudnya pemerataan, keamanan dan martabat manusia. Dalam periode yang telah ditetapkan dalam Strategi ini, AIP akan mengkaji keterlibatannya dalam pertumbuhan pedesaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah untuk memastikan tujuan strategis yang jelas, hasil yang efektif dan terciptanya peluang kerja.

Pertumbuhan ekonomi hanya akan berlanjut jika ada **manajemen ekonomi** yang baik. AIP akan mendukung agenda reformasi Indonesia yang lebih luas, yang didasarkan pada program-program bantuan Australia yang sudah ada, seperti *Government Partnership Fund*, dan akan mendukung diadakannya dialog dengan lembaga-lembaga keuangan internasional. AIP juga akan membantu dalam penanganan manajemen ekonomi nasional dan masalah-masalah kebijakan, termasuk dalam

masalah yang sarat peraturan, seperti pajak dan administrasi, manajemen hutang, peraturan sektor keuangan, kebijakan perdagangan internasional dan kebijakan fiskal. Dukungan juga akan lebih terfokus pada upaya untuk memastikan bahwa reformasi ekonomi nasional dapat meningkatkan perencanaan, anggaran dan pemberian pelayanan di tingkat kabupaten, di mana sekitar sepertiga dana pemerintah dihabiskan. Australia juga akan membantu Indonesia melaksanakan Instruksi Presiden tentang pengarusutamaan gender

#### PROGRAM NASIONAL UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Program Nasional untuk Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MANDIRI) merupakan program Pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan peluang kerja. Program ini berfokus pada serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pembangunan masyarakat dan akan mencakup 75.000 desa, dengan anggaran pemerintah sebesar US\$800 juta per tahun untuk mengurangi tingkat pengangguran perempuan dan laki-laki. PNPM-MANDIRI terkait dengan dukungan banyak donor, juga dukungan dari beberapa program AIP. Australia telah bekerja sama dengan Bank Dunia untuk mendukung program ini sebagai jalan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat secara efektif melalui pendekatan program terkoordinasi yang dipimpin oleh Indonesia. Australia telah memberikan sumbangan langsung yang nyata dan berusaha untuk lebih memadukan kegiatan-kegiatan AIP-masyarakat dengan PNPM-MANDIRI. Australia akan mencari cara yang efektif untuk mendukung Indonesia dan memperluas kontribusi AIP kepada PNPM-MANDIRI, mengingat program ini mengusahakan terciptanya peluang kerja, pemerintahan ekonomi yang berpusat pada masyarakat, sumber energi yang dapat diperbaharui (micro-hydro), ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berbasis masyarakat, dan mendorong kesetaraan gender.

(Inpres 9/2000), mengingat bahwa kesetaraan gender dapat membantu mengurangi kemiskinan dan membantu pertumbuhan ekonomi.

## PILAR 2: INVESTASI UNTUK PEMBANGUNAN MANUSIA

**Australia akan bekerja sama dengan Indonesia untuk memberikan:**

- > akses dan sistem kesehatan yang lebih baik
- > mutu, akses dan penanganan pendidikan yang lebih baik.

Mencapai tujuan dalam bidang kesehatan dan pendidikan yakni 'perbaikan kualitas, kemudahan akses dan tata kelola yang lebih baik' dan 'memperkokoh sistem kesehatan yang memungkinkan Indonesia untuk mencapai target MDG yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak, penanganan HIV/AIDS dan penyakit utama lainnya, dan menangani flu burung dengan lebih baik di daerah target' sangatlah penting guna memungkinkan masyarakat Indonesia berpartisipasi secara penuh di bidang ekonomi, mencari pekerjaan dan memperoleh pendapatan. Pilar 2 menyediakan sumber daya untuk membantu Indonesia membangun kapasitas sumber daya manusia yang mampu mendorong pertumbuhan.

**Pendidikan.** Indonesia telah menunjukkan kemajuan penting dalam usahanya memenuhi target pendidikan yang tercantum dalam MDGs. Tingkat partisipasi sekolah dasar telah mencapai lebih dari 90 persen (dengan jumlah anak perempuan dan anak laki-laki yang seimbang). Prioritas Pemerintah Indonesia adalah meningkatkan kualitas di semua lapisan, dan pencapaian target 100% tingkat partisipasi sekolah dalam pendidikan menengah pertama pada tahun 2010. Akan tetapi, kesenjangan pencapaian target tetap terjadi antara daerah-daerah kaya dan daerah-daerah miskin. Pendidikan disampaikan melalui sekolah negeri dan sekolah agama swasta, di mana siswa sekolah Islam mencakup 15 persen dari keseluruhan siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Di bawah reformasi desentralisasi, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten sama-sama bertanggung jawab atas penyediaan pendidikan umum.

AIP mendukung Pemerintah Indonesia untuk mencapai sasaran penyediaan pendidikan dasar sembilan tahun bagi anak perempuan dan laki-laki dengan membantu meningkatkan kemudahan mendapatkan akses pendidikan dan kualitas serta peningkatan tata kelola sektor pendidikan. Untuk mencapai target ini, Australia akan mengusahakan pendekatan harmonisasi dengan berbagai donor, termasuk dengan Uni Eropa, Bank Dunia dan Pemerintah Belanda.

*Pelajar mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas karena kurikulum, materi mengajar, pelatihan guru dan pengelolaan sekolah yang lebih baik. FOTO: AusAID*



Untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola sektor pendidikan, Australia akan terus menyediakan bantuan langsung melalui program-program bilateral dan secara aktif mendukung langkah-langkah Pemerintah Indonesia dalam koordinasi bantuan multi donor dan pendekatan sektor secara menyeluruh. Pada tingkat nasional, AIP bertujuan meningkatkan dampak positif dari sumber-sumber daya pendidikan yang dimiliki Indonesia dengan menyediakan bantuan teknis dan anggaran untuk menghapus kesenjangan dalam hal penyusunan kebijakan pendidikan, membantu penyusunan anggaran dan perencanaan, meningkatkan sistem peningkatan kualitas guru, kurikulum dan materi, dan mengembangkan standar nasional. AIP juga akan terus mendukung sekolah-sekolah Islam guna memperkecil kesenjangan mutu antara madrasah dan sekolah umum. Dana akan diberikan pada sekolah di tingkat kabupaten untuk meningkatkan kualitas guru dan manajemen operasional pada sistem sekolah negeri dan sekolah Islam. Partisipasi masyarakat akan dibangun di tingkat ini agar keberhasilan program ini dapat ditiru oleh program-program pendidikan Indonesia yang lebih besar. Bantuan pada tingkat bawah ini sangat penting guna memahami tantangan-tantangan yang dihadapi, sehingga kegiatan ini dapat memberikan masukan demi terciptanya program dan kebijakan nasional yang lebih baik.

Pada tahun 2009, di akhir komponen pinjaman Program Pendidikan Dasar dari Australia sejumlah \$200 juta, AIP akan terus mendukung pembangunan sekolah, dengan memprioritaskan provinsi dan kabupaten yang terpencil. Mulai tahun 2009, hibah akan diberikan melalui sistem pemerintahan Indonesia guna mengadopsi pelaksanaan terbaik dalam pembangunan dan proses konstruksi sekolah yang dihasilkan program ini, yang dapat dipadukan secara lebih luas dalam sistem pendidikan.

AIP menargetkan hasil pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak perempuan. Kesetaraan jender akan disertakan di semua kegiatan guna meningkatkan kesetaraan jender dalam posisi pengajaran dan manajemen, mengatasi stereotip dalam materi belajar dan menyediakan infrastruktur yang tepat. Untuk membantu pembuatan kebijakan yang mengacu kepada fakta (*evidence-based policy*), Australia akan mendukung Indonesia mengembangkan sistem untuk pengumpulan data yang memuat perbandingan siswa dan siswi yang terdaftar di sekolah dan jumlah perempuan yang ada di posisi manajemen dan kepemimpinan.

Dukungan Australia di sektor pendidikan akan tanggap terhadap perubahan prioritas kebijakan Indonesia, termasuk langkah-langkah untuk memenuhi target MDGs. Jika target MDGs

Indonesia terpenuhi, AIP akan mempertimbangkan dukungan di bidang lainnya, misalnya bantuan untuk Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dan/atau Sekolah Menengah Kejuruan. Australia juga akan terus memberikan bantuan di tingkat perguruan tinggi, melalui banyak program beasiswa.

**Beasiswa** sangat berguna untuk mendorong pembangunan dan memelihara hubungan antara masyarakat Australia dan Indonesia. Beasiswa yang tepat sasaran dengan komposisi jumlah gender yang seimbang dapat menjadi bentuk bantuan yang efektif dan berguna – beasiswa dapat membantu penerimanya menjadi pemimpin, dapat memberikan akses menuju pendidikan yang lebih tinggi dan membantu mereka memahami pengembangan ekonomi.

Program beasiswa akan mendukung keempat pilar AIP dengan sasaran meningkatkan sumber daya manusia dan ketersediaan calon pemimpin dalam bidang-bidang yang menjadi prioritas. Tujuan yang lebih strategis akan dicapai dengan memadukan tiga unsur program Beasiswa Australia – *Australian Development Scholarships*, *Australian Leadership Awards* dan *Endeavour Scholarships*.

Kombinasi antara *Australian Development Scholarships* dan *Australian Leadership Awards* akan menawarkan sejumlah 270 kesempatan belajar di universitas-universitas Australia setiap tahunnya. Akan ada kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan, dengan prioritas pengembangan kapasitas di sektor publik, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Beasiswa ini diprioritaskan bagi mereka yang berasal dari provinsi-provinsi tertinggal. Jaringan Alumni Beasiswa Australia akan membantu mengembangkan jaringan alumni yang lebih kokoh dan memungkinkan penerima beasiswa memberikan kontribusi maksimal mereka setelah kembali ke Indonesia. Guna memantau efektivitas program, survey jangka panjang akan dilaksanakan untuk mengukur keberhasilan karier penerima beasiswa.

**Kesehatan.** Pembangunan ekonomi Indonesia telah meningkatkan kualitas kesehatan sebagian besar penduduknya. Meskipun demikian, anggaran pemerintah untuk sektor kesehatan tetap rendah jika diukur berdasarkan standar internasional. Meskipun indikator-indikator kesehatan meningkat, Indonesia akan mengalami kesulitan untuk mencapai target MDGs terkait dengan angka kematian ibu dan pencegahan penyebaran HIV. Selain itu, pencapaian terkini pada tingkat nasional menutupi kesenjangan yang terjadi di provinsi-provinsi dan wilayah-wilayah termiskin. Di bawah desentralisasi, pemerintah lokal kesulitan untuk menemukan,



Para ibu membawa bayi-bayi mereka untuk ditimbang di sebuah puskesmas di Papua, cek rutin ini membantu memantau dan memperbaiki kondisi kesehatan bayi. Kesehatan ibu saat hamil dan sesudah melahirkan juga menjadi fokus *Kemitraan Australia Indonesia*. FOTO: AusAID

membiayai dan mengolah sumber daya manusia yang dibutuhkan dengan baik dalam melaksanakan mandat yang mereka terima. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan masalah kesehatan masih rendah, begitu pula dengan permintaan publik akan peningkatan sektor kesehatan.

Setelah lima tahun AIP berjalan, proporsi pendanaan untuk meningkatkan kesehatan akan bertambah besar. Kegiatan utamanya akan terpusat pada perbaikan sistem kesehatan baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten. Di tingkat provinsi dan kabupaten, kegiatan akan terfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan kesehatan setelah melahirkan, terutama di provinsi-provinsi tertinggal yang menjadi prioritas. Pencegahan HIV dan perawatan bagi pengidap HIV, dan kerjasama dengan Indonesia untuk memerangi flu burung tetap menjadi prioritas utama. Bantuan untuk meningkatkan tata kelola dan mengurangi korupsi akan diterapkan di seluruh kegiatan di sektor kesehatan.

**Memperkuat sistem kesehatan.** Bagi Australia, memperkuat kinerja dan akuntabilitas sistem kesehatan merupakan bentuk bantuan baru. Fokusnya akan mengarah pada dukungan kebijakan, uji coba perencanaan dan penyusunan anggaran berdasarkan fakta (*evidence-based*), dan mendukung koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam hal memberikan masukan. Pada umumnya dukungan disampaikan melalui bantuan teknis guna meningkatkan kemampuan, dan melalui pembiayaan pelatihan dan perencanaan kebijakan berdasarkan fakta dan pengumpulan data sehingga bisa ditiru. AIP juga akan mengalokasikan bantuannya untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan di tingkat kabupaten.

Untuk membantu Indonesia mencapai target penurunan angka kematian ibu, AIP berencana untuk meningkatkan jumlah kelahiran yang ditangani oleh tenaga-tenaga terlatih, dan menurunkan angka

kematian ibu akibat malaria dan anemia. Kegiatan ini akan termasuk pendanaan untuk kantor dinas kesehatan daerah agar mereka bisa meningkatkan pelayanan kesehatan, konsultasi perencanaan dari tingkat bawah ke atas, penyusunan anggaran yang melibatkan para penerima manfaat dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan sistem kesehatan.

Memahami bahwa keterbatasan fisik memberikan kontribusi dan menciptakan kemiskinan di Indonesia, AIP akan mengembangkan pendekatan yang bisa memastikan masalah keterbatasan fisik ditangani secara tepat. AIP akan mencari cara terbaik untuk mengarusutamakan masalah keterbatasan fisik dalam penyusunan program dan untuk menetapkan kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan prioritas Indonesia (terutama bagaimana menangani kebutaan yang bisa disembuhkan dan dicegah dengan belajar pada sukses yang telah dicapai oleh *Australia-Bali Memorial Eye Centre*). AIP akan menggunakan pendekatan yang luas dan tanpa batas guna mengentaskan kemiskinan, sehingga kebutuhan orang-orang dengan keterbatasan fisik akan dibahas dan tercantum dalam diskusi kemitraan, rancangan, pengkajian dan pengukuran keberhasilan program.

**HIV.** Menurunkan tingkat penyebaran HIV dan menyediakan perawatan bagi para pengidap HIV, khususnya di provinsi-provinsi di Papua – di mana HIV telah mewabah – menjadi prioritas yang semakin penting. AIP bertujuan untuk membatasi penyebaran HIV dengan membangun kemampuan pemerintah pusat dan daerah agar tanggap mengenai masalah ini, dan dengan mendukung keterlibatan masyarakat umum dalam pembentukan kebijakan. Di mana HIV berdampak sangat besar bagi kehidupan masyarakat – terutama di Papua, dan juga di Jawa, yang penderitanya adalah mereka yang menggunakan obat-obatan terlarang melalui jarum suntik dan para narapidana – AIP juga



Bantuan akan diberikan kepada penderita cacat. Pak Ponijo, penderita polio, menggunakan dana hibah dari Australia untuk bisnis perbaikan sepeda di Yogyakarta yang membantu menghidupi keluarganya. FOTO: Dian Lestari

akan mendukung penyediaan fasilitas perawatan, dan membentuk program-program peningkatan kesadaran masyarakat guna menurunkan stigma yang melekat kepada para pengidap HIV.

Ketidaksetaraan gender merupakan faktor utama penularan HIV, baik penularan melalui hubungan heteroseksual atau disebabkan oleh konsumsi obat-obatan terlarang dengan menggunakan jarum suntik yang kemudian ditularkan kepada pasangan. AIP akan berusaha mengembangkan perubahan sikap yang efektif serta pendekatan pencegahan yang melibatkan baik perempuan maupun laki-laki, termasuk bantuan hukum bagi korban kekerasan rumah tangga. Jika ada potensi sinergi, pengarusutamaan HIV akan tercantum di seluruh program bantuan.

**Flu Burung** yang telah mewabah di kalangan peternak unggas Indonesia menghadirkan bahaya besar bagi negara ini juga bagi dunia. Keberadaan sistem respon kesehatan yang canggih diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Berbagai kegiatan yang mendukung gagasan-gagasan yang telah diambil oleh Pemerintah Indonesia, masyarakat sipil dan anggota lembaga donor lainnya, kini dalam tahap uji coba.

AIP akan mencari mekanisme baru yang lebih fleksibel untuk membantu Indonesia menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pemberian hutang luar negeri akan diperhitungkan dan perhatian yang lebih besar akan diberikan kepada masalah tuberkulosis dan cara menangani penyakit ini dalam lima tahun mendatang.

Australia sangat mendukung koordinasi donor di sektor kesehatan dan HIV, dan AIP akan secara aktif mengusahakan pendekatan anggaran bersama dengan lembaga donor-donor lainnya, seperti Bank Pembangunan Asia dan *Global Fund for HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria*.

### PILAR 3: DEMOKRASI, KEADILAN DAN PEMERINTAHAN YANG BAIK

Australia akan bekerjasama dengan Indonesia untuk memberikan:

- > Kapasitas, akuntabilitas dan daya tanggap yang lebih kuat terkait lembaga-lembaga serta proses hukum, demokrasi dan pengawasan
- > Pemerintah daerah dan manajemen keuangan publik yang lebih baik, sesuai dengan permintaan daerah.

Indonesia terus mengkonsolidasikan proses demokrasinya dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahannya. Meskipun kemajuan telah terjadi sejak transisi menuju demokrasi di tahun 1999, kualitas dari lembaga-lembaga demokrasi publik dan akuntabilitasnya masih harus ditingkatkan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia menekankan pentingnya melanjutkan reformasi di bidang hukum, menegakkan hak asasi manusia, memberantas korupsi dan meningkatkan kualitas administrasi publik. Pilar 3 bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas bidang-bidang utama diatas, yang memang sangat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah dan kepercayaan diri akan terbentuknya Indonesia yang sejahtera. AIP akan mengkonsolidasikan fokusnya pada bidang demokrasi, keadilan dan tata kelola yang baik, dan berkonsentrasi pada bagian-bagian yang memungkinkan tujuan pembangunan bisa tercapai.

Di bawah Pilar 3, AIP akan mendukung Indonesia memperkuat kapasitas dan kemampuannya dalam menanggapi kebutuhan lembaga-lembaga hukum, demokrasi dan pengawasannya, dan meningkatkan kinerja pemerintah provinsi dan kabupaten tertentu, terutama di bidang manajemen keuangan publik. Fokus pada pemerintah-pemerintah daerah tertentu mengingat pentingnya peran mereka dalam

memberikan pelayanan sebagai konsekuensi dari desentralisasi. Mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi dalam membentuk tata kelola yang baik, bentuk dukungan dalam bidang ini diwujudkan melalui kegiatan uji coba dari beragam gagasan, memonitor tingkat keberhasilan kegiatan tersebut kemudian bekerja sama dengan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan ini dalam skala yang lebih besar di tingkat nasional.

Dengan adanya **reformasi hukum**, AIP akan mendukung peningkatan kapasitas lembaga hukum di tingkat pengadilan dan di tingkat lembaga-lembaga penting yang menjadi mitra pemerintah. Proses pembentukan undang-undang di tingkat pemerintah pusat, nasional dan kabupaten juga akan didukung. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, AIP akan berusaha meningkatkan kemudahan memperoleh keadilan bagi masyarakat miskin dan marjinal. AIP juga akan terus mendukung lembaga-lembaga yang bertujuan menegakkan hak asasi manusia dan hak perempuan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan kerangka institusional untuk memerangi korupsi.

Program dukungan yang lebih luas untuk membentuk **pemerintahan yang demokratis** akan dikembangkan (mulai tahun 2008). Program ini bertujuan untuk memfasilitasi pemahaman dan partisipasi publik yang lebih baik dalam proses demokrasi. Fasilitas ini termasuk memberikan dukungan awal kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dalam usaha meningkatkan mutu prosedur dan sistem penyimpanan data, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat akan

peran lembaga tersebut berikut berbagai proses di dalamnya. Australia akan mendukung Indonesia melaksanakan proses pemilihan umum yang baik di seluruh lapisan pemerintah, terutama pemilihan umum tahun 2009, mendukung masyarakat madani yang mampu menganalisa dan memonitor mutu proses pemilihan, dan mendorong warga negara untuk memahami proses demokrasi dan terlibat dalam proses tersebut.

Mendukung **masyarakat dan organisasi kemasyarakatan** (termasuk lembaga-lembaga penelitian) guna mendorong terciptanya debat produktif dan analisa merupakan bentuk bantuan yang sangat penting dalam Strategi Kerjasama ini. AIP akan terus membangun kapasitas masyarakat lokal dalam menuntut pemerintahan yang lebih baik, mengurangi korupsi, meningkatkan akses dan meningkatkan partisipasi dalam proses demokrasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan atmosfer yang memungkinkan masyarakat, kelompok masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan para pemimpin dalam badan-badan pemerintah untuk belajar satu sama lain. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di bidang ini akan mengacu pada keberhasilan kegiatan-kegiatan yang tengah berlangsung dan dirancang untuk melahirkan pemimpin-pemimpin dan agen-agen perubahan perempuan dan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat masyarakat. Akan ada juga dukungan kemitraan dengan organisasi masyarakat madani terpilih, termasuk organisasi-organisasi-organisasi besar

*Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang proses pemilu dan mendukung partisipasi mereka, menguatkan demokrasi di Indonesia. FOTO: Irene Insandjaja, AusAID*



Islam dan organisasi-organisasi yang menuntut kesetaraan gender di tingkat pusat dan daerah.

Indonesia belum memulai program **reformasi pelayanan publik** yang menyeluruh, namun ada beberapa badan pusat dan pemerintah daerah yang mengusahakan peningkatan administrasi publik dalam bidang yang terbatas, dengan tujuan untuk menghadirkan percontohan. Australia akan terus mendukung reformasi di sektor-sektor penting, seperti kesehatan dan pendidikan, dan mendukung kepemimpinan lokal untuk mencapai reformasi pelayanan publik dan meningkatkan kinerja pemerintah. Australia akan memberikan bantuan berdasarkan kemitraan jangka panjang Australia-Indonesia dan mempererat kemitraan ini dengan lembaga-lembaga publik yang penting dengan tujuan memperbaiki koordinasi kebijakan dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Bantuan kepada Indonesia untuk melaksanakan **Rencana Anti-Korupsi**-nya akan menjadi fokus utama selama lima tahun ke depan, dengan memberikan dukungan terus-menerus kepada lembaga-lembaga hukum, Komisi Pemerantasan Korupsi dan mengembangkan kegiatan-kegiatan strategis yang dipandang efektif untuk memerangi korupsi (misalnya manajemen keuangan dan pengadaan).

Bekerja sama dengan Pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan mutu **manajemen pengeluaran publik** akan menjadi fokus penting di tingkat nasional dan badan-badan pendukungnya, maupun pada tingkat provinsi dan kabupaten. AIP akan secara selektif berkonsentrasi pada pemerintah kabupaten di provinsi-provinsi prioritas guna memperbaiki proses dasar dan sistem yang diperlukan administrasi publik dalam melaksanakan kebijakan (misalnya melalui manajemen sumber daya manusia, aset dan penyimpanan data), dan memastikan anggaran belanja barang dan jasa direncanakan dan disusun secara efektif. Dukungan ini akan termasuk program ujicoba dengan pendekatan berbasis insentif guna meningkatkan manajemen keuangan publik dan mendukung pemberian pelayanan di tingkat kabupaten. Bantuan di tingkat provinsi dan kabupaten akan didukung oleh intervensi nasional terkait pengadaan barang dan jasa untuk publik, reformasi anggaran dan keuangan serta peluang reformasi audit sektor publik. Dukungan juga akan diberikan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Reformasi manajemen anggaran dan keuangan akan dilaksanakan mengacu pada pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh badan-badan pemerintah Australia dan mempercepat proses reformasi Indonesia sendiri

dalam menetapkan anggaran yang berbasis hasil dan kinerja serta membangun kerangka pengeluaran jangka menengah.

Dukungan untuk **penelitian** terapan akan menjadi sangat penting untuk menciptakan wacana dan penentuan kebijakan di Indonesia, termasuk di daerah. Dukungan akan diberikan dalam bentuk kemitraan antara Australia, Indonesia dan lembaga-lembaga multilateral terkait yang dapat meningkatkan kapasitas Indonesia untuk memutuskan topik penelitian yang tepat dan meningkatkan kualitas penelitian terapan, yang mencakup keempat pilar dalam strategi ini.

#### PILAR 4: KEAMANAN DAN KEDAMAIAN

**Australia akan bekerja sama dengan Indonesia untuk memberikan:**

- > **respon yang lebih baik atas kebutuhan kemanusiaan, keadaan darurat dan kerentanan terhadap bencana alam**
- > **kapasitas yang lebih baik dalam memastikan keselamatan dan keamanan transportasi dan dalam menghadapi ancaman-ancaman kejahatan lintas negara.**

Tingkat keamanan dan stabilitas Indonesia berkaitan erat dengan pembangunan ekonominya. Pertumbuhan kedua unsur di atas sempat terganggu akibat dari serangan teroris (seperti Bom Bali), gerakan separatis di Aceh dan ancaman-ancaman lintas batas yang berasal dari perpindahan manusia. Indonesia juga sangat rentan terhadap berbagai bencana alam berskala besar yang mengancam keselamatan banyak orang. Melalui Pilar 4, Australia bermaksud membantu Indonesia meningkatkan kemampuannya dalam merespon, mempercepat pemulihan dan serta mengurangi kerentanan Indonesia atas dari situasi-situasi tersebut.

Melalui bantuan yang diberikan dalam menghadapi tsunami di Aceh dan gempa di Yogyakarta, Australia telah menunjukkan bahwa negara ini merupakan mitra yang efektif dan terpercaya dalam **merespon bencana**. Meskipun demikian, Australia menyadari bahwa upaya tanggap bencana yang besar harus terkoordinasi, dan Australia akan bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain untuk mengembangkan tanggap bencana eksternal yang lebih terkoordinasi dalam memenuhi kebutuhan kemanusiaan dan keadaan darurat bencana. Australia bertujuan memberikan respon terhadap bencana yang tepat waktu dan efektif, membangun kapasitas mitra-mitra Indonesia dalam **kesiapan menghadapi bencana**



Murid sekolah di Pulau Nias melakukan simulasi bencana di sekolah agar mereka siap apabila terjadi gempa. Siaga bencana mengurangi resiko luka-luka dan kematian. FOTO: Mark Travers, AusAID

berikut respon yang diperlukan, meningkatkan mutu analisa risiko dan memperkuat perencanaan terkait penanganan peristiwa yang terjadi tiba-tiba.

Bantuan akan disampaikan melalui kemitraan yang telah terjalin, termasuk memperkuat kemampuan dari dua organisasi Islam terbesar Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, dan akan diperluas dengan membantu peningkatan kemampuan Palang Merah Indonesia. Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB) Pemerintah Indonesia akan didukung baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten melalui upaya peningkatan kinerja. Program pelatihan yang menyeluruh selama dua tahun akan diberikan kepada tim cepat tanggap Australia yang berbasis di Jakarta, dan tempat-tempat yang menyediakan peralatan pendukung pemulihan bencana/konflik juga akan dibuka di Jakarta. Untuk meningkatkan kualitas pengukuran risiko, pemetaan dan analisa konflik/bencana akan dilaksanakan secara teratur. Fokus provinsi dan kabupaten yang ditetapkan Australia, sesuai dengan reformasi desentralisasi Indonesia, yang juga menyertakan program-program jangka panjang yang memastikan kecukupan pangan bagi masyarakat-masyarakat yang rentan (misalnya di NTT).

Laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda dalam menghadapi bencana alam, menghadapi keadaan darurat, dan menyesuaikan diri dalam periode waktu dimana tragedi kemanusiaan terjadi. Mereka juga memiliki kemampuan yang berbeda dalam membantu masyarakat mencegah terjadinya pengalaman yang mengerikan tersebut dan dalam memulihkan diri dari penderitaan yang dialami. Australia akan terus merancang strategi yang mengacu pada perbedaan tersebut dan mendorong kesetaraan gender.

Membantu Indonesia meningkatkan **keselamatan transportasi dan memerangi kejahatan lintas negara** adalah salah satu bidang yang akan menjadi kunci kerjasama dan kemitraan jangka panjang.

Departemen-departemen dan badan-badan khusus Pemerintah Australia akan terus menyediakan bantuan yang praktis dan tepat sasaran guna meningkatkan kemampuan penegakan hukum di Indonesia, menghadapi terorisme, dan membantu lembaga-lembaga perhubungan dan pengawasan perbatasan sehingga mereka bisa menghadapi ancaman-ancaman kejahatan lintas negara dan meningkatkan standar keselamatan. Setelah Bom Bali di tahun 2002 dan 2005, Polisi Federal Australia mempererat kerjasamanya dengan Kepolisian Republik Indonesia, dan membantu pembentukan Pusat Koordinasi Kejahatan Lintas Negara dan Pusat Kerjasama Penegakan Hukum Jakarta. Kemitraan antara Departemen Imigrasi dan Kewarganegaraan Australia dengan pihak berwenang di Indonesia akan terus meningkatkan kemampuan di bidang bidang seperti manajemen perbatasan dan sistem peringatan. Program-program yang dijalankan melalui Departemen Pembangunan Infrastruktur, Transport, Regional Australia dan pemerintah provinsi dan kabupaten Indonesia akan mendukung upaya Indonesia dalam meningkatkan standar keselamatan dan keamanan transportasi, baik di udara maupun di laut.

Australia juga berkomitmen membentuk kerjasama yang erat dengan Indonesia dalam hal mencari solusi jangka panjang untuk masalah penangkapan ikan ilegal baik di kawasan perairan utara Australia maupun di perairan lain di kawasan Asia. Solusi ini akan dicapai melalui program-program yang dapat membantu pengentasan kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan masyarakat secara menyeluruh, dan membuka peluang kerja, termasuk dalam lingkungan masyarakat nelayan. Australia juga akan membantu memerangi penyelundupan manusia, sebagai salah satu bentuk usaha menghadapi masalah lintas batas, dengan bekerja sama dengan Indonesia dan negara-negara lainnya di kawasan Asia Tenggara.

## 6 Pelaksanaan strategi

Belajar dari kekuatan program pembangunan Australia di masa lalu, fokus ke depan berada pada efektivitas pembangunan, dukungan pada terciptanya kemitraan yang kuat dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dan dengan mitra-mitra non-pemerintah, dan pada penggunaan sistem pemerintahan Indonesia. Ini merupakan perubahan yang besar dari pendekatan bantuan tradisional berbasis proyek yang selama ini telah berlangsung. Dalam konteks ini, keberhasilan pembangunan selama lima tahun periode Strategi Kerjasama ini akan diukur berdasarkan efektifitas kinerja AIP dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan dan pemanfaatan sumber daya Indonesia dan dalam membantu negara ini mencapai target MDG nasionalnya.

AIP akan berfokus pada upaya-upaya peningkatan koordinasi antara Australia dan Indonesia di Indonesia. Australia akan memberikan lebih banyak wewenang perencanaan dan pelaksanaan program kepada kantor perwakilan AIP di Indonesia dan akan bekerja sama dengan mitra-mitra kerja dalam pemerintahan Indonesia untuk lebih memahami sistem yang berlaku di negara ini. Para pelaksana (staff) AIP akan membutuhkan keahlian-keahlian yang lebih baik dalam hal-hal teknis dan analisis, dan terlibat dalam pembuatan kebijakan. Peningkatan kemitraan juga menuntut peningkatan keahlian diplomatik, kemampuan berperan sebagai perwakilan organisasi, kerjasama dan kemampuan berbahasa yang lebih baik – guna membangun dan mempertahankan hubungan ini. AIP akan terus menggunakan tenaga penasehat di bidang-bidang yang menjadi prioritas. Selanjutnya, AIP menyadari bahwa diplomasi publik berperan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat di Australia dan di Indonesia mengenai manfaat

bersama dari kerjasama pembangunan ini. Ini juga merupakan cara utama untuk meningkatkan pemahaman mengenai masalah-masalah bilateral yang sensitif seperti Papua, penangkapan ikan secara ilegal, HIV, Pendidikan Islam dan upaya untuk menghadapi tindakan-tindakan radikal. Pendekatan kemitraan ini akan tercermin pada seluruh kegiatan diplomasi publik.

AIP dibangun berdasarkan keempat isu prioritas berikut yang menggarisbawahi Strategi ini:

- > kemitraan
- > kesetaraan jender
- > pemberantasan korupsi
- > prestasi.

### KEMITRAAN

**Pemerintah Indonesia dan memanfaatkan sistem pemerintahan Indonesia.** Tujuan umum AIP adalah kemitraan Australia dengan Pemerintah Indonesia dalam mengupayakan keberhasilan pembangunan Indonesia sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Prinsip kemitraan ini menjadi pegangan dalam pendekatan dan proses keterlibatan Australia – dimulai gagasan atau permintaan awal hingga ke pengembangan program, pengawasan, pelaporan dan pengkajian. Program-program ditetapkan untuk secara fleksibel merespon kebutuhan dan konteks kebijakan dari Indonesia. Pertukaran di bidang bantuan keahlian teknis tetap dipandang penting, demikian pula program-program pendanaan utama, seperti PNPM-MANDIRI (hal. 10). AIP akan terus mengupayakan peningkatan keahlian dan kekuatan dari berbagai lembaga-



Melalui pendekatan kemitraan, pejabat Pemerintah Australia bertukar pengalaman dan keahlian dengan mitranya dari Pemerintah Indonesia. FOTO: HK Logistics Pty Ltd

lembaga pemerintah Australia guna membantu Indonesia memenuhi kebutuhannya.

Mulai tahun 2008 hingga 2013, pendekatan proyek secara tradisional akan dikurangi dalam rangka memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk menggunakan sistemnya sendiri dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dengan lebih efektif

dan efisien. Bantuan akan disalurkan terutama melalui badan-badan pemerintahan Indonesia di tingkat nasional, dan di tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten di mana sebagian besar pengeluaran pemerintah kini dilakukan. Keterpaduan dengan sistem yang berlaku di Indonesia akan dilaksanakan secara selektif dan bisa disesuaikan

#### MEMANFAATKAN SISTEM PEMERINTAH INDONESIA – PROGRAM PENDIDIKAN DASAR

Program Pendidikan Dasar Australia-Indonesia (AIBEP) senilai \$355 juta sangatlah unik. Ini adalah program besar pertama yang dibiayai oleh Australia, yang menempatkan Pemerintah Indonesia sebagai pelaksana utama program kemitraan ini.

AIBEP dirancang untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah Pemerintah Indonesia yang menargetkan semua anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar sembilan tahun. Target ini akan tercapai terutama melalui pembangunan sekitar 2.000 sekolah di wilayah-wilayah terpencil dan termiskin di Indonesia. Pembangunan tersebut dibiayai oleh AusAID yang dananya disalurkan melalui Departemen Keuangan Indonesia untuk diteruskan kepada komite-komite pembangunan sekolah. Sumber daya tambahan disediakan melalui sejumlah kontraktor yang bekerja di bawah bimbingan Pemerintah Indonesia, guna mengatur semua unsur administrasi dan keuangan yang kompleks, serta kemajuan-kemajuan lain yang harus dicapai terkait dengan program pembangunan sebesar itu.

Pelaksanaan AIBEP yang bertahap memungkinkan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai untuk

disertakan di setiap tahap pembangunan berikutnya. Berikut ini contoh-contoh kemajuan yang dicapai: manajemen pembangunan yang komprehensif dan database pengawasan; pemeriksaan kualitas konstruksi; komite sekolah; dan pengawasan lapangan yang menyeluruh.

Hal penting lainnya adalah sistem pelaporan yang lebih baik yang memungkinkan tersedianya pertanggungjawaban keuangan kepada AIBEP setiap bulan, triwulan dan tahun; dan peningkatan transparansi, penyebarluasan informasi dan akuntabilitas yang lebih baik. Hal-hal tersebut dapat dicapai dengan membentuk sistem penanganan keluhan bersama antara Pemerintah Indonesia dan Australia, pemasangan papan pengumuman (yang memuat keterangan anggaran yang tersedia, bagaimana cara menyampaikan keluhan, jenis sekolah apa yang tengah dibangun, dan lain-lain), dan website yang memuat seluruh dokumentasi penting dari AIBEP, serta pertanggungjawaban keuangan per tahun yang telah diaudit untuk program tersebut, yang bisa diakses oleh masyarakat umum.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai AIBEP kunjungi: [www.bep.or.id](http://www.bep.or.id)

secara bertahap. Analisis risiko yang baik akan menjabarkan kelemahan dari sistem pemerintahan tersebut sebelum bantuan dana dari Australia diberikan, dan pelaksanaan program kemudian dilaksanakan secara bertahap dan interaktif guna memastikan keberlanjutan dan mengurangi risiko finansial. Risiko ini akan ditangani melalui rencana Aksi Anti Korupsi dan bantuan memperkuat sistem Pemerintah Indonesia, misalnya di bidang pengadaan untuk kepentingan publik.

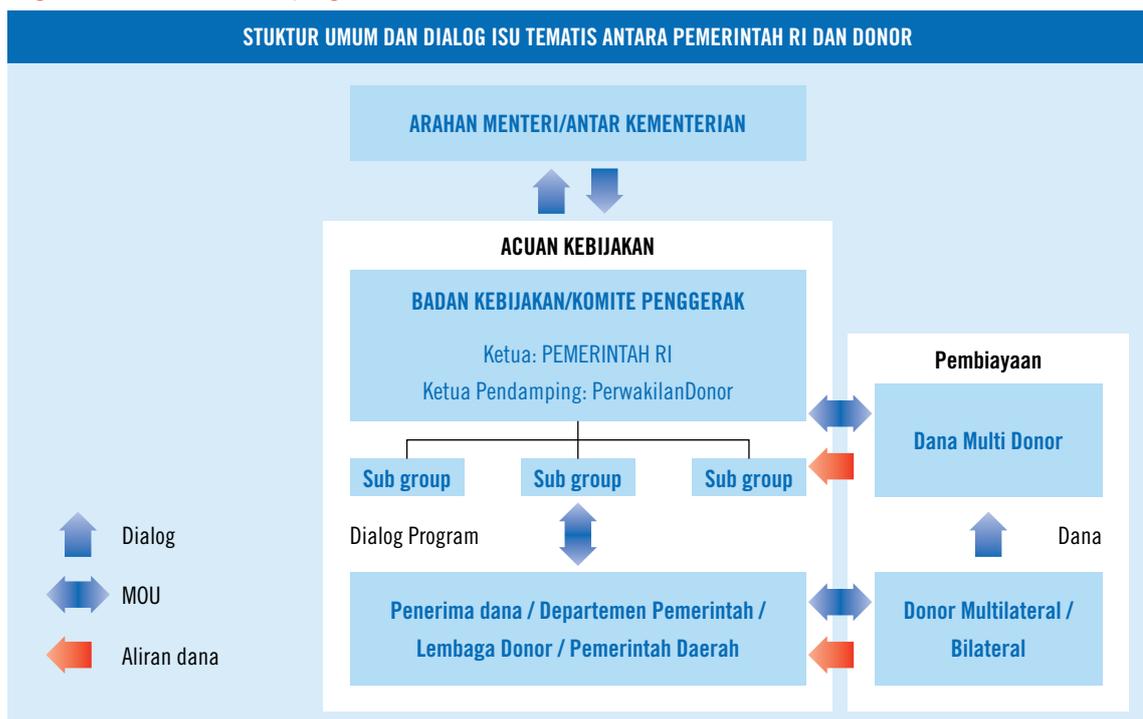
Rencana untuk bekerja melalui sistem yang berlaku di Indonesia tidak berarti peningkatan pemberian bantuan teknis semata. Selain bantuan teknis terus diberikan oleh lembaga-lembaga Pemerintah Australia, ahli-ahli dari Indonesia dan internasional juga akan dimanfaatkan. Australia juga akan mendukung sistem, kebijakan dan program-program pemerintah Indonesia melalui beragam bentuk bantuan lainnya, misalnya dengan mendanai secara langsung program-program utama Indonesia, menguji coba kegiatan-kegiatan percontohan yang inovatif yang akan memberikan masukan bagi program-program Pemerintah Indonesia, dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan dan mengembangkan kemampuan jangka panjang.

**Masyarakat madani.** AIP akan secara aktif membina hubungan dengan kelompok masyarakat maupun individu di Indonesia guna meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam proses demokrasi dan keinginan akan reformasi. Di Indonesia, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat memegang peranan penting dalam pembentukan wacana publik dan membantu terjadinya reformasi di tingkat pemerintah pusat, provinsi, dan kotamadya/kabupaten. Menyadari pentingnya peran organisasi Islam dalam pembangunan negara, AIP akan memperkokoh kemitraan yang telah ada dan menciptakan hubungan lebih erat dengan organisasi-organisasi utama Islam yang menghormati keberagaman, seperti termuat dalam Undang-Undang Dasar negara ini. Program ini akan memberikan dukungan kepada organisasi-organisasi perempuan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten guna mendorong tuntutan akan kesetaraan jender. Program ini juga akan mendorong hubungan yang lebih baik dengan kelompok serupa di kawasan Asia Pasifik.

**Harmonisasi antara Lembaga Donor.** Pemerintah Indonesia telah mengumumkan sebuah mekanisme koordinasi baru untuk meningkatkan harmonisasi antar lembaga donor dan peningkatan efektivitas bantuan (Bagan 2). Harmonisasi ini berpusat pada serangkaian program di berbagai sektor, terutama di sektor pendidikan, pengentasan kemiskinan, desentralisasi dan perubahan iklim. Para donor bisa menyumbang pelaksanaan program tersebut melalui pemberian dana multi donor atau kegiatan-kegiatan bilateral yang terkait dengan sektor yang dimaksud.

**Bagan 2: Mekanisme donor yang disarankan**



Sumber: BAPPENAS

Australia akan membantu Indonesia membentuk mekanisme koordinasi baru ini dan memastikan dukungan yang diperoleh sejalan dengan target sektor-sektor utama tersebut. Meskipun pendekatan multi donor yang makin sering dilakukan beresiko menimbulkan beberapa resiko dalam pengukuran dan pertanggungjawaban kontribusi AIP, pendekatan ini akan memberikan sumbangan yang besar bagi efektivitas dan efisiensi program, sejalan dengan Deklarasi Paris mengenai Efektivitas Bantuan Pembangunan. Risiko tersebut akan ditangani melalui identifikasi awal akan peluang-peluang pembukaan dan peluncuran kerjasama antara Australia-Indonesia untuk memastikan hasil yang layak dan sesuai.

Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, Komisi Eropa dan Lembaga Bantuan Luar Negeri Pemerintah Amerika Serikat (USAID), Departemen Pembangunan Internasional Pemerintah Inggris (DFID), Lembaga Kerjasama Teknis Pemerintah Jerman (GTZ) dan UNICEF merupakan para donor dan mitra utama bagi Indonesia, dan Australia telah sukses melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga tersebut. AIP juga akan terus mengembangkan pendekatan yang terharmonisasi dengan lembaga-lembaga tersebut dan juga donor-donor lainnya baik secara bilateral, multilateral maupun mekanisme pendanaan multi donor.

**Menyediakan cukup waktu dan sumber daya bagi program kemitraan.** Menerapkan prinsip-prinsip kemitraan dalam pelaksanaan program, memerlukan kerjasama di setiap langkah dari siklus program. Tujuan AIPRD untuk berfokus pada rancangan, rencana dan pelaksanaan bersama memerlukan pendekatan-pendekatan baru dalam menyusun dan melaksanakan program berdasarkan pada pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai sistem perencanaan dan anggaran yang berlaku di Indonesia. Pendekatan yang melibatkan Pemerintah Indonesia dan mitra-mitra lainnya ini dapat mengakibatkan penundaan pelaksanaan program dan pemanfaatan dana. Akan tetapi, hal ini sepadan saat melihat adanya peningkatan kualitas program dan program yang berkelanjutan. AIP menyadari bahwa diperlukan waktu dan sumber daya yang memadai untuk melakukan pendekatan ini.

Australia akan menyediakan sumber dayanya di Indonesia dan regional guna lebih memahami sistem-sistem Indonesia. Sumber daya program ini akan meningkatkan pemahaman mengenai atmosfer desentralisasi di Indonesia dengan cara menganalisa sistem yang berlaku (anggaran, manajemen pengeluaran publik, desentralisasi

#### FASILITAS PENDUKUNG DESENTRALISASI

Fasilitas Pendukung Desentralisasi (DSF) merupakan kantor multi donor yang bertujuan mendukung Pemerintah Indonesia menangani berbagai tantangan yang dihadapi negara ini sejak penerapan desentralisasi terutama pada sistem pelayanan masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan dan pendidikan. DSF fokus pada transfer dana fiskal antar pemerintah, mengidentifikasi pendekatan praktis terbaik yang mendukung kerangka kerja desentralisasi dan memetakan kegiatan seluruh donor yang terkait dengan desentralisasi. DSF bertujuan memastikan bahwa harmonisasi lembaga donor akan mendukung efektivitas program bantuan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat miskin Indonesia.

DSF memiliki kantor di Makassar dan menangani 12 provinsi di bagian timur Indonesia. Kantor ini berkonsentrasi untuk memperkuat pemerintah daerah dan pembangunan masyarakat. Ini dilakukan melalui analisa (misalnya analisa pengeluaran dana berbasis masyarakat), perencanaan dan pelaksanaan proyek percontohan guna mengidentifikasi program apa yang paling dibutuhkan di provinsi-provinsi dimaksud, serta mendukung lokakarya regional yang berfokus pada pertukaran informasi dan reformasi.

DSF merupakan mekanisme yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengkoordinasikan bantuan-bantuan teknis untuk desentralisasi. Dukungan AIP dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan hasil pembangunan dengan mempererat kesatuan dan koordinasi bantuan dan memungkinkan pertukaran informasi antar donor dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. AIP memiliki karyawan yang ditempatkan di Jakarta dan Makassar untuk membantu koordinasi dan meningkatkan kinerja donor dan program-program pemerintah di Indonesia.

dan kapasitas), mencari penyebab terhambatnya pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi, agar mampu meningkatkan kemampuan Australia untuk mendukung sistem dalam kondisi-kondisi tersebut. Australia juga akan mendukung kemitraan tingkat provinsi dan kabupaten melalui pejabat dan karyawan yang ditempatkan di Kupang, Makassar dan Banda Aceh.



*Kesetaraan gender merupakan prioritas dari Kemitraan Australia Indonesia, dengan fokus di sektor pendidikan termasuk guru, kepala sekolah dan murid perempuan. FOTO: AusAID*

## KESETARAAN JENDER

Kesetaraan gender akan menjadi prioritas AIP. Dalam membantu Indonesia meraih target MDG-nya, Strategi Kerjasama ini akan memperkuat program-program yang sudah berjalan dan mendukung kesetaraan gender, sesuai dengan kondisi di Indonesia dan sejalan dengan prioritas Pemerintah Indonesia. Australia akan memastikan bahwa analisa gender termasuk dalam penyusunan dan pelaksanaan setiap program baru maupun program yang tengah berjalan, dan masukan dari seorang pakar gender akan diminta saat mengkaji program-program tersebut. Australia juga akan memastikan akuntabilitas dengan lebih memadukan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam suatu program dengan menyertakannya sebagai salah satu indikator pengukuran kinerja pelaksanaan program. Selanjutnya, indikator kesetaraan gender akan secara jelas dimasukkan ke dalam kerangka pengawasan dan evaluasi dan pelaporan kepada pihak yang berwenang melalui Kerangka Pengukuran Kinerja (Lampiran 2).

Australia dan Indonesia akan menggali potensi pelaksanaan kegiatan-kegiatan kesetaraan gender tertentu (seperti pengumpulan data yang menyertakan jenis kelamin, uji coba penyusunan anggaran yang peka gender, atau membantu pelaksanaan proses-proses yang berkeadilan gender di kantor-kantor pelayanan masyarakat). Untuk meningkatkan kekuatan yang sudah ada dan hubungan yang telah terjalin dalam program bantuan Australia, maka tata kelola pemerintahan, pengembangan masyarakat, kesehatan, HIV dan pendidikan telah ditentukan sebagai bidang prioritas untuk penerapan kesetaraan gender.

Komitmen untuk mendorong kesetaraan gender memerlukan pemahaman yang baik mengenai isu gender dalam masyarakat, maupun kebijakan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Maka, AIP akan menyediakan penasehat khusus yang meneliti dan menganalisa masalah gender, yang juga bertanggung jawab atas masalah-masalah gender, dan yang akan mengidentifikasi kebutuhan serta kontribusi yang harus diberikan terkait dengan gagasan-gagasan gender. AIP juga akan memastikan penasehat gender ini bisa dengan mudah dihubungi di (dari kantor perwakilan AIP) Jakarta. Para kontraktor, konsultan dan seluruh mitra pemerintah akan diminta untuk memastikan unsur kesetaraan gender termasuk dalam kerangka acuan, kriteria seleksi dan pengukuran kinerja setiap program, dan secara aktif mengawasi perkembangannya. AIP juga akan memastikan agar pasal-pasal yang berisi tentang keharusan penyertaan data jenis kelamin disertakan dalam kontrak dan perjanjian yang dibuat bersama mitra pelaksana program.

## MEMBERANTAS KORUPSI

Kemitraan Anti Korupsi Australia-Indonesia untuk Rencana Pembangunan 2008–2013 dikembangkan melalui konsultasi intensif dengan para pemangku kepentingan utama baik dari Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia, maupun masyarakat dan para donor di Indonesia. Kemitraan ini menjadi kerangka strategis bantuan Australia bagi upaya anti korupsi di Indonesia dan bertujuan membantu Indonesia memasyarakatkan sikap anti korupsi yang berkelanjutan. Fokus dari rencana tersebut adalah:

- > mendukung strategi dan prioritas anti korupsi Pemerintah Indonesia dengan meningkatkan kemampuan pelaksanaan, dialog kebijakan dan meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mengawasi upaya anti korupsinya
- > meningkatkan sistem pemerintahan Australia dan Indonesia untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pendanaan pembangunan
- > mengembangkan kegiatan-kegiatan yang dapat membantu Indonesia memberantas dan mencegah korupsi.

## KINERJA

Strategi Kerjasama ini akan lebih menekankan pada pengukuran efektivitas bantuan pembangunan Australia melalui Kerangka Pengukuran Kinerja yang menyeluruh. Kerangka tersebut akan menentukan bidang-bidang utama, di mana AIP akan mengukur hasil berdasarkan setiap tujuan Strategi Kerjasama ini. Dokumen-dokumen pendukung juga telah disiapkan untuk menentukan pada bagian mana AIP dapat membantu Indonesia mencapai target pembangunannya, dan juga menentukan data-data awal, target dan indikator yang dapat digunakan untuk memonitor kinerja berdasarkan setiap tujuan Strategi. Evaluasi tahunan atas kemajuan pelaksanaan dibandingkan dengan tujuan dalam strategi ini akan dilaksanakan menggunakan kerangka di atas dan jika memungkinkan, pengukuran dilakukan bersama

dengan Pemerintah Indonesia. AIP akan memastikan penetapan target yang lebih baik dan penggunaan sumber daya secara lebih efektif dengan:

- > Menggunakan indikator-indikator dan sistem evaluasi target MDG yang ditetapkan Pemerintah Indonesia dimana bisa, untuk mengukur kemajuan dari gagasan-gagasan bantuan Australia sambil memperbaiki sistem tersebut dan memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk merancang kebijakan.
- > Memperkuat sistem kinerja Pemerintah Indonesia di bidang-bidang prioritas, termasuk pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten prioritas (terutama di bidang pemberian pelayanan dan manajemen keuangan), kantor-kantor pusat (BAPPENAS, Departemen Keuangan); dan Departemen Pendidikan.
- > Memanfaatkan kegiatan berbasis insentif dan Fasilitas Pendukung Desentralisasi, guna mendorong pembuatan kebijakan yang mengacu kepada fakta di tingkat pemerintah daerah dengan memberikan insentif pendanaan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan peningkatan kinerja.

Setelah pemilu Indonesia tahun 2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010–2014, pengkajian jangka menengah AIP akan dilaksanakan demi memastikan prioritas Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia tercapai dengan baik.

## LAMPIRAN 1: KERANGKA KERJA STRATEGIS: KEMITRAAN AUSTRALIA INDONESIA 2008–13

<b>Tujuan</b>	Bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam mencapai Indonesia yang lebih sejahtera, demokratis, dan aman. <i>Isu-isu utama: kemitraan, kesetaraan gender, memberantas korupsi, kinerja</i>	
<b>Rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah RI</b>	<b>Menciptakan Indonesia yang sejahtera</b>	
<b>Fokus bidang dan pendekatan Australia</b>	<p><b>Pilar 1: Pertumbuhan yang berkelanjutan dan manajemen ekonomi</b></p> <p>Australia mengakui pertumbuhan ekonomi Indonesia serta perannya dalam ekonomi regional dan global. AIP akan menyediakan tenaga ahli teknis dan pertukaran antar kedua negara untuk membantu Indonesia meningkatkan keuntungan dari pertumbuhannya.</p> <p>Provinsi-provinsi miskin dengan indikator perkembangan SDM yang rendah akan menjadi fokus kegiatan inovatif untuk mengurangi kendala-kendala pembangunan.</p> <p>Meningkatkan fokus dalam kerjasama dengan Indonesia dan donor lainnya dalam hal perubahan iklim serta manajemen sumber daya alam berkelanjutan, terutama melalui pengurangan emisi akibat penebangan hutan.</p>	<p><b>Pilar 2: Investasi untuk pembangunan manusia</b></p> <p>Indonesia makin meningkatkan kualitas SDMnya, terutama melalui penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan.</p> <p>Australia akan bekerja sama dengan Indonesia dalam memperkuat kebijakan, sistem, dan cara kerja di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten untuk memperbaiki penyediaan pelayanan dan hasilnya bagi laki-laki dan perempuan.</p> <p>AIP akan menyediakan dukungan dimana ada kesempatan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; bantuan yang sejalan dengan program Indonesia dan yang bisa langsung memperbaiki praktek dan kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten.</li> <li>&gt; meningkatkan keinginan publik untuk mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik.</li> </ul>
<b>Lembaga Pemerintah Australia yang terkait</b>	Lembaga Bantuan Internasional Australia; Departemen Luar Negeri dan Perdagangan; Departemen Keuangan; Departemen Perubahan Iklim; Departemen Urusan Air, Warisan Budaya dan Seni; Departemen Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; Departemen Keuangan dan Deregulasi; Departemen Pendidikan, Tenaga Kerja dan Hubungan Tempat Kerja; Pusat Penelitian Pertanian Internasional; Badan Statistik Australia; Kantor Pajak Australia; Bank Sentral Australia; Komisi Sekuritas dan Investasi Australia; Badan Regulasi Manajemen Keuangan; Kantor Audit Nasional Australia; Komisi Pelayanan Publik Australia; Departemen Urusan Keluarga, Perumahan, Layanan Masyarakat, dan Masyarakat Asli Australia.	Lembaga Bantuan Internasional Australia; Departemen Pendidikan; Tenaga Kerja dan Hubungan Tempat Kerja; Departemen Kesehatan dan Penuaan; Departemen Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; Departemen Luar Negeri dan Perdagangan.
<b>Sukses yang akan dicapai</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Peningkatan manajemen sumber daya alam dan respon terhadap perubahan iklim.</li> <li>2 Kebijakan ekonomi yang lebih baik dan manajemen ekonomi yang lebih kuat di tingkat nasional.</li> <li>3 Berkurangnya kendala dalam pertumbuhan infrastruktur dan produktifitas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4 Sistem dan akses kesehatan yang lebih baik.</li> <li>5 Kualitas pendidikan, akses dan tata pemerintahan yang lebih baik.</li> </ol>
<b>Arti kerjasama</b>	<p>Merubah cara Australia memberikan bantuan pembangunan agar dapat bekerja sama lebih erat dengan Indonesia. Fokus kepada bantuan. Berfokus pada penguatan dan bekerja dalam sistem Indonesia dan dengan selektif bekerja sama dengan institusi-institusi utama Indonesia. Mendukung kebutuhan Indonesia untuk bantuan teknis yang sudah ditargetkan dan pertukaran ahli untuk mendapatkan hasil yang berkesinambungan. Kemitraan akan digunakan secara selektif dan berdasarkan keadilan dan transparansi.</p> <p>Australia akan terus mengubah caranya mengembangkan dan memberikan bantuan. Pemahaman yang kuat atas kebijakan dan sistem di Indonesia akan menjadi dasar analisis dan pengembangan program.</p> <p>Kemanapun arah tujuan donor-donor lain, AIP akan berkoordinasi dengan mereka dan menggunakan dana dari beberapa donor dengan tujuan akhir untuk mendukung kebijakan dan sistem Indonesia.</p>	
<b>Dimana akan bekerja</b>	<p>Fokus pada tingkat nasional dan provinsi. Australia akan a) menargetkan pertumbuhan ekonomi b) mendukung layanan publik di propinsi-propinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi c) mempercepat bantuan untuk daerah yang tertinggal. Australia akan memfokuskan bantuan pada Papua, Papua Barat, NTT dan NTB, serta Nanggroe Aceh Darussalam. Fokus ini akan memungkinkan Australia untuk meraih sukses kumulatif dan mendapatkan hasil yang lebih besar di provinsi-provinsi tersebut.</p>	
	<p>AIP akan menyediakan bantuan di luar kelima propinsi utama ini apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; pencapaian tujuan sektoral yang spesifik membutuhkan fokus geografi yang lebih luas</li> <li>&gt; bekerja dalam sistem Indonesia dan Pemerintah Indonesia menentukan prioritas bantuan.</li> </ul>	<p>Australia akan bekerja dengan provinsi dan kabupaten lain untuk mengatasi masalah yang mempengaruhi kepentingan Australia dan Indonesia. Ini termasuk, mendukung pendidikan Islam di Jawa, kehutanan di Kalimantan Barat dan Tengah dan kehidupan pedesaan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, walau tidak terbatas pada hal ini saja.</p>

<p><b>Menciptakan keadilan dan demokrasi untuk semua warga negara</b></p>	<p><b>Menjamin Indonesia yang aman dan damai</b></p>
<p><b>Pilar 3: Demokrasi, keadilan, dan pemerintahan yang baik</b></p> <p>AIP berfokus meningkatkan kapasitas dan kemampuan institusi-institusi hukum dan demokrasi.</p> <p>AIP juga akan meningkatkan keterlibatan masyarakat sipil untuk menuntut pemerintahan yang baik.</p> <p>Bantuan AIP akan fokus untuk memperdalam kemitraan jangka panjang dengan institusi-institusi publik utama dengan menyediakan bantuan ahli serta meningkatkan manajemen anggaran publik di seluruh lembaga pemerintahan.</p>	<p><b>Pilar 4: Keamanan dan kedamaian</b></p> <p>Bantuan AIP akan fokus membantu lembaga-lembaga pemerintahan Indonesia agar secara efektif dapat menangani bencana, keadaan darurat, serta ancaman dan kejahatan transnasional.</p> <p>AIP akan merespon terhadap keadaan darurat apabila Indonesia meminta bantuan dan akan mengintegrasikan prinsip pengurangan resiko di dalam program tersebut.</p> <p>Ketika AIP merespon, AIP akan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia serta organisasi yang berbasis di Indonesia.</p>
<p>Lembaga Bantuan Internasional Australia; Departemen Luar Negeri dan Perdagangan; Kantor Perdana Menteri dan Kabinet; Kejaksaan Agung; Departemen Keuangan dan Deregulasi; Biro Statistik Australia; Ombudsman Australia; Komisi Pemilihan Umum Australia; Dewan Perwakilan Rakyat; Departemen Senat, Pengadilan Tinggi Australia; Polisi Federal Australia; Departemen Pendidikan, Tenaga Kerja dan Hubungan Tempat Kerja.</p>	<p>Lembaga Bantuan Internasional Australia; Polisi Federal Australia; Departemen Pertahanan; Departemen Luar Negeri dan Perdagangan; Departemen Imigrasi dan Kewarganegaraan; Badan Bea Cukai Australia; Austrac; Departemen Infrastruktur, Transportasi, Pembangunan Regional dan Pemerintahan Daerah; Departemen Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; Kejaksaan Agung; Departemen Pendidikan, Tenaga Kerja dan Hubungan Tempat Kerja.</p>
<p><b>6 Kapasitas, pertanggungjawaban dan respon terhadap institusi legal dan demokrasi yang lebih kuat berikut prosesnya.</b></p> <p><b>7 Peningkatan manajemen keuangan publik serta pemerintah lokal, yang sesuai dengan tuntutan lokal.</b></p>	<p><b>8 Respon terhadap bantuan kemanusiaan, keadaan darurat dan bencana yang lebih baik.</b></p> <p><b>9 Meningkatnya kapasitas guna menjamin keamanan layanan perhubungan dan melawan ancaman kejahatan transnasional.</b></p>

<p><b>Wilayah dimana bantuan Australia akan selesai atau berubah</b></p>	<p>Program akan selesai atau berubah apabila tidak dapat menunjukan bahwa program tersebut memenuhi criteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; bekerja dengan inovatif sehingga dapat diaplikasikan atau dapat dicontoh oleh Indonesia</li> <li>&gt; masuk ke dalam kebijakan atau program Indonesia</li> <li>&gt; membangun partisipasi masyarakat dan meningkatkan keinginan untuk hasil pembangunan yang lebih baik</li> <li>&gt; memberikan kontribusi keapda tujuan Strategi Kerjasama.</li> </ul>
<p><b>Implementasi isu prioritas tinggi</b></p>	<p>Meningkatkan kesetaraan jender serta memberdayakan perempuan melalui keterlibatan yang adil dalam pengembangan dan pengambilan keputusan di seluruh program. Memastikan prinsip kesetaraan jender selalu menjadi bagian dari perencanaan, pengawasan dan pelaporan dari semua gagasan dan keseluruhan program. Area yang diprioritaskan termasuk: tata pemerintahan (termasuk anggaran yang sensitif terhadap isu jender, pengembangan masyarakat, kesehatan, HIV dan pendidikan).</p> <p>Menjadikan pemberantasan korupsi sebagai fokus utama di seluruh program yang didanai Australia. Mendukung upaya Pemerintah Indonesia yang menargetkan manajemen pengadaan dan keuangan. Membantu Indonesia dalam mengurangi korupsi yang berkelanjutan (sesuai dengan rencana anti korupsi di Indonesia). Memperkuat sistem Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pemerintah.</p>
<p><b>Cara mengukur kesuksesan</b></p>	<p>Kerangka Kerja Penilaian Kinerja Strategi Kerjasama akan menjadi dasar pengawasan program bantuan Australia. Ini dapat dicapai melalui Laporan Tahunan Kinerja Program.</p> <p>Mengalokasikan sumber daya yang lebih besar guna memastikan pertanggungjawaban program yang efektif. Meningkatkan pemahaman dan dukungan Australia atas sistem informasi Pemerintah Indonesia guna memperkuat pengawasan program-program Australia. Apabila memungkinkan – membantu memperkuat kemampuan Indonesia dalam mengawasi kebijakannya sendiri dan mengawasi program-program Australia dengan menggunakan sistem ini.</p>

## LAMPIRAN 2: KERANGKA KERJA PENILAIAN KINERJA KEMITRAAN AUSTRALIA INDONESIA 2008–2013<sup>1</sup>

Menciptakan Indonesia yang sejahtera				
Manajemen ekonomi dan pembangunan berkelanjutan			Investasi untuk pembangunan manusia	
<b>1. Meningkatkan manajemen sumber daya alam, dan respon terhadap perubahan iklim</b>	<b>2. Meningkatkan kebijakan ekonomi dan memperkuat manajemen ekonomi di level pusat</b>	<b>3. Mengurangi halangan pertumbuhan infrastruktur dan produktifitas</b>	<b>4. Memperkuat sistem kesehatan sehingga Indonesia dapat mencapai target MDG untuk kesehatan ibu dan anak, HIV/AIDS dan penyakit umum lainnya di daerah-daerah yang ditargetkan serta mengatasi flu burung</b>	<b>5. Meningkatkan kualitas, akses dan penataan pendidikan dasar</b>
<p>Fokus mekanisme pengukuran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; pengembangan kerangka kerja kebijakan nasional dan provinsi untuk mengurangi emisi akibat penebangan hutan dan degradasi (REDD)</li> <li>&gt; kemampuan untuk mengukur emisi efek rumah kaca akibat penebangan hutan hingga mencapai level akurasi yang bisa menyediakan akses ke pasar karbon internasional</li> <li>&gt; mengurangi emisi akibat efek rumah kaca dengan mengurangi penebangan hutan di wilayah demonstrasi REDD (MDG).</li> </ul>	<p>Fokus mekanisme pengukuran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan keberlanjutan fiskal                             <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; administrasi pajak</li> <li>&gt; manajemen hutang yang berkelanjutan</li> <li>&gt; manajemen keuangan, termasuk anggaran, manajemen tunai dan pengadaan.</li> </ul> </li> <li>2. Stabilitas dan regulasi keuangan yang lebih baik                             <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; pengawasan modal dan pasar yang bijaksana</li> <li>&gt; pengawasan dan pengaturan kerapuhan sistem keuangan</li> <li>&gt; alur keuangan antara tingkat pusat dan daerah.</li> </ul> </li> </ol>	<p>Fokus mekanisme pengukuran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produktifitas daerah pedesaan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; model yang memperhatikan jender dalam produktifitas rural dan terbentuk dan tersebarnya akses pasar</li> <li>&gt; akses terhadap pasar, informasi dan keuangan bagi laki-laki dan perempuan.</li> </ul> </li> <li>2. Infrastruktur jalan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; tingkat kebijakan, peraturan, kapasitas dan kendala keuangan dalam investasi infrastruktur di tingkat nasional dan sub nasional</li> <li>&gt; waktu perjalanan dan biaya operasional kendaraan di wilayah yang ditargetkan</li> <li>&gt; efektifitas prosedur pengawasan rancangan dan konstruksi, termasuk kepastian prosedur pengadaan jalan Pemerintah Indonesia.</li> </ul> </li> <li>3. Air bersih dan sanitasi                             <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; jumlah orang yang memiliki akses air bersih dan fasilitas sanitasi di wilayah yang ditargetkan (MDG)</li> <li>&gt; integrasi sistem kebijakan penyediaan air bersih dan sanitasi dalam strategi perencanaan dan anggaran pemerintah daerah.</li> </ul> </li> </ol>	<p>Fokus mekanisme pengukuran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; keterlibatan masyarakat, kinerja dan manajemen pelayanan kesehatan dalam peningkatan kesehatan ibu dan balita di daerah yang ditargetkan (termasuk MDG nomor 5 dalam hal kesehatan ibu)</li> <li>&gt; kapasitas dari mitra-mitra Indonesia dalam memimpin, merencanakan, mengelola, serta meningkatkan pendanaan program HIV di daerah-daerah yang ditargetkan, termasuk mempertimbangkan faktor gender</li> <li>&gt; kapasitas dalam mengenali dan mengontrol kasus flu burung pada unggas serta meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi dan merespon apabila ada masyarakat yang terjangkit virus ini di daerah yang ditargetkan.</li> <li>&gt; kemajuan dalam target yang sudah diambil dari perencanaan kesehatan strategis pemerintah.</li> </ul>	<p>Fokus mekanisme pengukuran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; tingkat pendaftaran siswa kotor dan bersih di tingkat SMU dan SMP di wilayah kabupaten yang ditargetkan (kontribusi terhadap MDG)</li> <li>&gt; tingkat kelulusan di SMU dan SMP di wilayah kabupaten yang ditargetkan</li> <li>&gt; persentase sekolah dan institusi bersangkutan serta sistem yang sesuai dengan standar BSNP pendidikan nasional di wilayah kabupaten yang ditargetkan</li> <li>&gt; kapasitas dalam mengukur kinerja sektor pendidikan dan menggunakan temuan tersebut untuk menginformasikan alokasi sumber daya serta manajemen keuangan di tingkat nasional dan lokal.</li> </ul>
<b>Kerjasama</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Bagaimana hubungan jangka panjang kelembagaan antara Indonesia dan Australia selama ini terjalin?</li> <li>2 Bagaimana AIP memberikan kontribusi terhadap inovasi dan/atau memperkuat sistem di dalam lembaga-lembaga Indonesia?</li> <li>3 Bagaimana AIP menggunakan sistem Indonesia, terutama dalam pengadaan?</li> <li>4 Bagaimana AIP bermitra dengan donor lainnya dibawah pengarahannya Pemerintah Indonesia? Bagaimana kinerja AIP apabila disejajarkan dengan komitmen Deklarasi Paris?</li> </ol>			
<b>Anti-Korupsi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Bagaimana AIP membantu Indonesia mengurangi tingkat korupsi yang berkelanjutan sesuai dengan rencana Anti Korupsi Australia-Indonesia?</li> <li>2 Bagaimana AIP memperkuat sistem Australia dan Indonesia untuk memastikan pendanaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan?</li> </ol>			

<sup>1</sup> Kerangka Kerja Penilaian Kinerja akan dikaji ulang setiap tahun.

**Menciptakan keadilan dan demokrasi untuk semua warga negara**

**Indonesia yang aman dan damai**

**6. Memperkuat kapasitas, pertanggungjawaban dan respon institusi legal dan demokrasi berikut prosesnya**

Fokus mekanisme pengukuran:

- > kemajuan dalam perencanaan reformasi Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung
- > akses terhadap keadilan bagi wanita dan masyarakat miskin
- > kapasitas Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan investigasi
- > kemajuan dalam memilih indikator dari Rencana Nasional dalam Penegakan Hak Asasi Manusia
- > transparansi, pertanggung jawaban, dan akses terhadap parlemen bagi laki-laki dan perempuan
- > manajemen pemilu dan pemahaman laki-laki dan perempuan tentang pemilu.

**7. Memperbaiki perencanaan dan penyampaian pejabat pemerintah, termasuk dengan memperkuat manajemen keuangan publik dan meningkatkan keinginan masyarakat untuk menuntut akuntabilitas dan akses pelayanan publik yang lebih baik**

Fokus mekanisme pengukuran:

- > pengadaan, disediakannya sumber daya dan manajemen keuangan publik di tingkat lokal, termasuk di kesehatan dan pendidikan
- > meningkatkan pemahaman, tuntutan serta partisipasi masyarakat sipil dan universitas lokal dalam perencanaan, anggaran dan proses pelaksanaan di tingkat provinsi
- > agenda reformasi pemerintah daerah lebih diprioritaskan dan diimplementasi.

**8. Memberikan respon dan mengurangi kerentanan terhadap bencana, bantuan kemanusiaan dan berbagai keadaan darurat**

Fokus mekanisme pengukuran:

- > kapasitas Pemerintah Indonesia di tingkat nasional dan provinsi dan kapasitas masyarakat dan komunitas sipil dalam memberikan respon terhadap bencana
- > efektifitas dan ketepatanwaktu distribusi bantuan makanan
- > stabilisasi penempatan pengungsi dan dukungan untuk kembali memiliki tempat tinggal.

**9. Meningkatkan kapasitas dalam memastikan keselamatan & keamanan transportasi dan menghadapi kejahatan lintas negara**

Fokus mekanisme pengukuran:

- > laboratorium kesehatan publik yang aman
- > manajemen keamanan penerbangan dan maritim
- > efektifitas badan penegakan hukum untuk mendeteksi serta menghentikan kejahatan dan/atau pelaku kejahatan
- > memperkuat manajemen migrasi serta kontrol di perbatasan untuk mengatasi resiko akibat perpindahan orang yang secara ilegal
- > kapasitas untuk mengatasi kejahatan lintas negara
- > kapasitas pemerintah Indonesia untuk mendeteksi dan mengatasi penangkapan ikan secara ilegal.

**Gender**

- 1 Apakah AIP sudah mendukung kesetaraan akses bagi laki-laki dan perempuan atas layanan dan proses demokrasi?
- 2 Bagaimana AIP mendukung kesetaraan dalam pengambilan keputusan oleh laki-laki dan perempuan?
- 3 Bagaimana AIP membantu mendukung hak asasi wanita?
- 4 Bagaimana AIP meningkatkan pemahamannya terhadap kendala yang mungkin dihadapi dalam isu kesetaraan laki-laki dan perempuan?

**Orientasi Performa**

- 1 Bagaimana AIP meningkatkan kinerjanya dalam tingkat gagasan dan sektor?
- 2 Bagaimana AIP menggunakan informasi kinerja milik Pemerintah Indonesia dalam proses pengawasan?
- 3 Bagaimana AIP memperbaiki pengambilan keputusan kebijakan berdasarkan bukti di dalam Pemerintah Indonesia?

